LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA MINAPOLITAN GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU

Oleh:
DR. BUDI SANTOSO, M.A.P., M.TR.OPSLA
KOLONEL MARINIR NRP. 10151/P

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV LEMHANNAS RI
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum warahmatullahi.wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menyusun sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : “Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Dalam Pembangunan Kota Minapolitan Guna Mewujudkan Ekonomi Biru”

Dasar penulisan Judul Taskap tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA XLIV Tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada yang terhormat Bapak Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV tahun 2022 Lemhannas RI. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Tutor Pembimbing Taskap yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M. serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing penyusunan Taskap ini hingga dapat selesai sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap adanya saran masukan guna perbaikan dan penyempurnaan naskah ini. Selain itu penulis juga berharap Taskap ini dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis bagi siapa saja yang membutuhkan pemikiran ini, serta dapat dikembangkan lebih lanjut bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pelayanan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Penulis,

Dr. Budi Santoso, M.A.P., M.Tr.Opsla.

Kolonel Marinir Nrp. 10151/P

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

   Nama : Dr. Budi Santoso, M.AP., M.Tr.Opsla

   Pangkat : Kolonel Marinir Nrp.10151/P

   Jabatan : Sahli F Binpotnakuatmar Koarmada II

   Instansi : TNI AL

   Alamat : Perum Prima Garden Estate Blok A.5 No.09 Sukodono Sidoarjo - Jawa Timur

   Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

   a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.

   b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Yang Menyatakan

Dr. Budi Santoso, M.A.P., M.Tr.Opsla.
Kolonel Marinir Nrp.10151/P

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……i
KATA PENGANTAR ……ii
PERNYATAAN KEASLIAN…….....iv
DAFTAR ISI ……..... v

BAB I PENDAHULUAN ……1
1. Latar Belakang ……1
2. Rumusan Masalah ……4
3. Maksud dan Tujuan ……5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika ……5
5. Metode dan Pendekatan ……6
6. Pengertian ……6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……..8
7. Umum ……8
8. Peraturan Perundang-undangan……..8
9. Kerangka Teoritis……9
10. Data dan Fakta……..……16
11. Lingkungan Strategis……20

BAB III PEMBAHASAN…………..23
12. Umum ……...……23
13. Peningkatan Jumlah dan Penataan Fasilitas Pelabuhan Perikanan …....23
14. Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan……28
15. Pembangunan Kota Minapolitan Ramah Lingkungan……..……32

DHARMMA TANHANA MANGRVA

BAB IV PENUTUP…….…….…….51
16. Kesimpulan…….51
17. Saran……..……..……..55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.000 (Statistik Indonesia, 2021)[1] sehingga mendasari penyebutan Indonesia sebagai "*Archipelagic State*". Luas laut Indonesia 3.257.357 km2, sedangkan luas daratan 1.919.443 km2. Luas wilayah keseluruhan 5.176.800 km2, (berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau "*United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica). Posisi geografi Indonesia dengan laut yang luas memiliki kekayaan berbagai jenis ikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Posisi strategis dan wilayah laut yang luas dan kaya sumber daya, menjadikan Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan sumber daya lautnya.

Kekayaan alam hayati dan non hayati di laut sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut sebagian telah dapat dikelola dan sebagian lainya masih berupa potensi yang belum dapat dimanfaatkaan karena keterbatasan kemampuan teknologi dan ekonomi. Sumber daya alam tersebut punya peran penting sebagai kontribusi pembangunan negara bagi kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi.

Ekonomi Indonesia dapat maju dengan memprioritaskan ekonomi maritim, mengingat 70% wilayahnya adalah perairan. Dari padangan tersebut maka terciptalah misi mewujudkan Indonesai sebagai Poros Maritim Dunia, dimana indonesia akan menjadi pusat kegiatan maritim dunia, baik dalam proses produksi maupun proses distribusi kebutuhan hidup. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat lima pilar utama yang menjadi prioritas pembangunan yaitu: a) membangun kembali budaya maritim Indonesia; b) berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; c) komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut,

[1] Statistik Indonesia 2021

pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim; d) diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan e) membangun kekuatan pertahanan maritim.

Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang cukup dan melimpah, namun tidak tercermin dalam kondisi kehidupan sosial ekonomi sebagai masyarakat maitim. Dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia masih agraris, serta banyak masyarakat nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Budaya masyarakat nelayan masih belum dapat mengelola ekonomi dengan baik, dengan minimya peralatan yang dimiliki para nelayan berpengaruh terhadap hasil tangkap para nelayan. Demikian juga keterbatasan dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik merupakan alasan bertahan sebagai nelayan. Hasil tangkapan nelayan tradisional sangat terbatas karena minimnya peralatan dan rendahnya ketrampilan. Pemerintah telah melaksanakan pendekatan ekonomi biru dengan menitik beratkan ekonomi kreatif dan inovatif sektor maritim untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagai solusi menciptakan sumber ekonomi baru yang lebih sejahtera, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.8/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan bahwa pelabuhan perikanan sebagai perangsang timbulnya industri perikanan sehingga perlu kemampuan memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas. Pelabuhan perikanan mepunyai pengaruh penting dalam pengembangan industri perikanan. Industri perikanan yang berlokasi di sekitar pelabuhan dapat menghemat transportasi darat, serta hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan dapat segera diproses produksi sehingga tidak terjadi turunnya nilai jual.

Faktor yang menjadi semakin pentingnya pelabuhan perikanan adalah luasnya perairan Indonesia dan besarnya sumber daya yang ada. Indonesia menempati posisi kedua negara penghasil produk perikanan dengan jumlah produksi 24 juta ton per tahun. Saat ini ekspor produk perikanan Indonesia sebesar 1 juta ton atau sekitar 4 persen dari total produksi per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspor produk perikanan. Dengan semakin meningkatnya permintaan dunia, maka semakin besar pula peluang ekspor ikan dari Indonesia.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas pelabuhan perikanan yang tersedia saat ini, masih belum mencukupi dan penyebarannnya belum merata dibandingkan dengan potensi yang ada antara Kawasan Indonesia Barat (80%) dan Kawasan Indonesia Timur (20%). Pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada masih belum dilengkapi fasilitas yang memadai baik jenis, kapasitas maupun mekanisnya. Akibatnya pelayanan yang diberikan kepelabuhanan perikanan belum mencapai sasaran optimal. Belum optimalnya pelayanan kepelabuhanan perikanan antara lain karena sebagian fasilitas yang ada sudah rusak dan kapasitasnya sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu perluasan area atau dilakukan mekanisasi terhadap fasilitas yang ada.

Saat ini pelabuhan perikanan belum bisa memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas sesuai harapan nelayan. Pelayanan kepelabuhanan yang profesional dan berkualitas dapat menciptakan masyarakat yang loyal dan mematuhi kebijakan kepelabuhanan perikanan. Budaya pelayanan berkualitas perlu dijadikan standar dan dilaksanakan secara terintegrasi antar pelaksana pelayanan untuk menciptakan loyalitas masyarakat sekaligus sebagai upaya penegakan aturan kebijakan pemerintah dalam menciptakan program ekonomi biru yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Pelaku usaha perikanan banyak yang belum taat tata administrasi usaha perikanan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran kegiatan penangkapan ikan. Padahal masyarakat nelayan dapat menjadi pendorong upaya mengembangkan ekonomi perairan, sehingga lebih banyak investasi di bidang sumberdaya perairan. Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat diharapkan program ekonomi biru menjadi pedoman pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak kepada rakyat, membuka kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kelautan dan perikanan dapat dipacu melalui percepatan produksi berkualitas dan berdaya saing tinggi. Peningkatan produksi ini akan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia.

Implementasi program ekonomi biru di Indonesia dapat dicapai melalui pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah menggunakan konsep Kota Minapolitan. Pembangunan Kota Minapolitan merupakan sebuah program yang bertujuan mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan dan

tempat usaha bagi masyarakat, serta dapat menekan laju urbanisasi. Pengembangan konsep tersebut dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Pelayanan kepelabuhanan perikanan yang belum optimal merupakan faktor yang berpengaruh penting dalam upaya membangun Kota Minapolitan, oleh karena itu penting untuk dikaji karena administrator kepelabuhanan merupakan instansi pelayan publik yang melayani kebutuhan operasional nelayan. Otoritas kepelabuhanan sebagai aktor utama pelayanan barang, jasa dan administrasi kepada masyarakat melalui fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan melalui pelayanan publik. Tata kelola masyarakat maritim pada Kota Minapolitan perlu disikapi oleh birokrasi kepelabuhanan perikanan yang handal, sehingga aktifitas pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Melihat kondisi saat ini pelayanan kepelabuhanan perikanan masih belum dapat memenuhi kebutuhan nelayan, terbukti banyaknya kapal-kapal perikanan yang tidak bisa melaksanakan operasi karena tidak memenuhi layak sebagai kapal penangkap ikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pelayanan kepelabuhananan perikanan dalam upaya membangun Kota Minapolitan yang ramah lingkungan perlu untuk dikaji dan ditemukan solusi agar ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya perairan bagi kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan perikanan di masa yang akan datang.

2. Rumusan Masalah

Melihat fenomena pelayanan kepelabuhanan perikanan yang belum optimal mendukung pembangunan Kota Minapolitan serta besarnya manfaat bagi masyarakat maka perlu dilaksanakan analisa dan dicari solusi pemecahan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Diantaranya faktor pengaruh adalah tingkat tersedianya fasilitas sumber daya organisasi dan sistim pelayanan kepelabuhanan perikanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah adalah: **“Bagaimana meningkatkan pelayanan kepelabuhanan perikanan dalam pembangunan kota minapolitan guna mewujudkan ekonomi biru”.**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan kajian adalah:

a. Bagaimana meningkatkan jumlah dan penataan fasilitas pelabuhan perikanan?

b. Bagaimana meningkatkan pelayanan kepelabuhanan perikanan?

c. Bagaimana membangun kota minapolitan yang ramah lingkungan untuk mewujudkan ekonomi biru?

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan kajian di atas maka maksud dan tujuan dari penulisan ini yaitu:

a. Maksud penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan kepelabuhan perikanan dalam pembangunan kota minapolitan guna mewujudkan ekonomi biru di Indonesia.

b. Tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana memberikan pelayanan kepelabuhanan perikanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat dalam membangun kota minapolitan guna mewujudkan ekonomi biru di Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup dan sistematika penulisan Kerta Karya Ilmiah Perorangan ini adalah sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dibatasi pada pelabuhan perikanan kelas C (Pelabuhan Perikanan Pantai), dengan persoalan jumlah dan fasilitas sumber daya organisasi, peningkatan pelayanan kepelabuhan perikanan, serta pembangunan kota minapolitan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. Sistematika penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum pelayanan kepelabuhan perikanan, maksud dan tujuan serta rumusan masalah dijabarkan dalam beberapa pertanyaan kajian; 2) Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan peraturan perundang-undangan terkait, kerangka teoritis, data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis; 3) Bab III Pembahasan,

merupakan analisis pemecahan masalah didasarkan pada aturan yang berlaku, teori-teori dan data dukung; dan 4) Bab IV Penutup, berupa simpulan dan rekomendasi sebagai masukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepelabuhanan perikanan guna membangun kota minapolitan yang ramah lingkungan dan bekelajutan

5. Metode dan Pendekatan

a. **Analisis Deskriptif.** Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, didukung dengan data sekunder dan data primer. Indikator yang digunakan dalam analisis ini diantaranya sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat (*human capital dan social capital*) dan sarana prasarana.

b. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan kebijakan dan strategi (Gurel & Tat, 2017). Pendekatan dilihat dari 2 faktor yaitu faktor internal atau *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal atau External *Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS) terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

6. Pengertian

Untuk kesamaan persepsi, disampaikan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini.

a. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.[2]

[2] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

b. Kota Minapolitan adalah adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.[3]

c. Ekonomi Biru adalah konsep yang dikembangkan untuk menjawab tantangan, sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan karena keserakahan.[4]

d. Lingkungan Hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.[5]

e. Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.[6]

TANHANA DHARMMA MANGRVA

[3] Diana Indra Dewi, *Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan*, FKIP UMP, h. 22

[4] Sharif C. Sutardjo, *Blue Economy Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

[5] Emil Salim, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, h. 34

[6] Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung h.128

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pelabuhan perikanan memiliki peran strategis dalam mengelolan sumber daya perikanan dan kelautan, pelabuhan perikanan menjadi penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan, pengguna langsung dan tidak langsung seperti pedagang, pengolah dan industri, sehingga peran pelabuhan perikanan sebagai aktor utama program ekonomi biru sangat penting. Pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi permasalahan lingkungan dan kesehatan laut seperti kualitas air laut, kualitas udara, kebisingan industri, limbah kapal dan konservasi yang punya resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Dasar pustaka yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan analisis permasalahan terkait pelayanan kepelabuhanan perikanan berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis untuk mendapatkan hasil pemecahan masalah yang terukur dan komprehensif.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam analisa dan pembahasan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat mineral, gas, minyak bumi dan sumber kekayaan alam di laut lainnya sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasal 13 Ayat (1) dan (2) menjelaskan Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan seperti pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan, ekonomi kelautan, pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut, dan budaya bahari.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, berisi upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja RUU Cipta Kerja, Pasal 349 menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan serta daya saing daerah. Penyederhanaan layanan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik di daerah dapat diatur melalui peraturan daerah. Selain itu juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasiltas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

9. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan metoda untuk pemecahan masalah yang dilakukan oleh penulis dengan dukungan teori-teori sebagai dasar pemikiran. Landasan teori juga disebut sebagai sketsa penelitian, merupakan penjelasan untuk mendukung hasil pengkajian yang didapatkan oleh pengkaji sehingga dapat bernilai ilmiah.

Teori merupakan kalimat atau ide-ide yang memiliki keterkaitan sebuah konsep, definisi, dan proposisi untuk menjelaskan secara sistematik mengenai fenomena melalui pemikiran-pemikiran para ahli secara spesifik dan ilmiah, dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian teori adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena atau pemikiran yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.[7]

Teori yang digunakan pada Taskap ini fokus kepada teori-teori yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, antara lain:

a. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Hal tersebut guna mendukung fasilitas pokok dan penunjang operasional pelabuhan yang optimal. Selama ini dalam pembangunan pelabuhan perikanan, kita masih sering terfokus pada masalah kegiatan aktifitas terkait perikanan tangkap semata, dengan mengesampingkan fungsi umum pelabuhan dan fasilitas pokok terkait keselamatan, seperti yang lazim berlaku di pelabuhan-pelabuhan umum padahal unsur keselamatan adalah sesuatu yang harus selalu dilibatkan dalam perencanaan pendirian pelabuhan, walaupun pelabuhan tersebut berklasifikasi kecil dan khusus.[8]

---

[7] Zulganef, 2008. Metodologi Penelitian Sosial dan Bisnis Yogyakarta: Graha Ilmu. h .113

[8] Triatmojo, S. Pelabuhan. Beta Offset Universitas Gajah Madha: Yogyakarta.

b. Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim[9] lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup cukup luas dan disederhanakan bahwa ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro[10], yang menyatakan lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

c. Teori Administrasi Publik

Menurut Woodrow Wilson[11] Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, dan tujuan negara.

Tabel - 1 : Perkembangan Teori Administrasi Publik

NO	ELEMEN	OPA	NPM	NPS
1.	Dasar epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi, beragam pendekatan
2.	Konsep publik interest	Sesuatu uang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan	Kepentingan publk mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
3.	Siapa. yang dilayani	Clients dan constituents	pelanganggan	Warga negara

[9] Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm 34
[10] Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1980, hlm 67.
[11] Kamaruddin, S. Administrasi dan pelayanan publik antara teori dan aplikasinya, Ombak, Yogyakarta, 2016. hlm.48

4.	Peran pemerintah	Mengayuh	Mengarahkan	melayani
5.	Rasionalitas dan model perilaku manusia	Rasionalotas sinoptis, manusia administratif	Rasionalitas teknis dan ekonomis, “economicaman”, pengambilan keputusan yang self-interested	Rasionalotas strategi atau formal, uji rasionalitas berganda (politis, ekonomi, dan organisasional)
6.	akuntabilitas	Menurut hierarki administrasi	Kehendak pasar yang merupakan hasil kenginan customers	Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum, komunitas, norma politik, profesionalisme. Kepentingan citizen
7.	Diskresi administrasi	Diskresi terbatas pada petugas administratif	Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial	Dikresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
8.	Struktur organisasi	Oraganisasi birokratis, kewenangan top-down	Organisasi publik terdesentralisasi	Struktur kolaboratif antara kepmimpinan eksternal dan intenal
9.	Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan	Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada	Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif	Membangun koalisi antara agensi publik, non-profil, dan swasta
10.	Dasar motivasi perangkat dan administrator	Gaji, tunjangan diseertai perlindungan bagi pegawai negeri	Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah	Pelayanan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat

Sumber : Olahan peneliti

d. Teori Organisasi

Teori Oranisasi manurut Stephen P. Robbins,[12] mendefinisikan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja

[12] Robbins, Stephen, P.. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prehalindo. 2006. hlm: 260.

atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Tabel - 2 : Perkembangan Teori Organisasi

NO	TEORI ORGANISASI	PERKEMBANGAN	TAHUN
1.	Klasik	Petunjuk mekanistik struktual yang kaku, bukan kreativitas	1800
2.	Kalsik 1 Birokrasi	Sebuah model organisasi normatif, yang menekankan struktur dalam organisasi	1864
3.	Klasik 2 Teori Administrasi	Menekankan pada aspek makro dan praktik langsung manajemen.	1900
4.	Klasik 3 Manajemen Ilmiah	seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja atau dengan pernyataan lain	1900
5.	Neoklasik	Sistematis organisasi informal, dan pengaruhnya pada organisasi formal	1913
6.	Modern	Multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan	1950

Sumber : Olahan peneliti

e. Teori Pelayanan Publik

`Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Kurniawan (2005)[13] mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik di dalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik dikatakan bahwa, pada umumnya

[13] Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.

pelayanan publik adalah mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik.

f. Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Subandi[14] Pembangunan Ekonomi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*income perkapita*) dalam jangka panjang. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu deskriptif analitis dan pilihan kebijakan.

Menurut Sadano Sukirno dalam buku Iskandar Putong bahwa ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang menganalisis biaya dan keuangan dengan memperbaiki penggunaan sumber daya.[15]

g. Teori Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan model pembangunan berkelanjutan dengan memandang laut sebagai potensi yang memberikan peluang ekonomi baru serta sebagai sumber dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian berkelanjutan.

Tiga pilar ekonomi biru mendasari pembangunan berkelanjutan dengan fokus terhadap profit, manusia dan lingkungan. Profit akan tetap tercapai melalui aktivitas perekonomian yang berkelanjutan maupun penggunaan energi kelautan yang terbarukan. Pembangunan tetap berupaya mencapai keuntungan tanpa menyingkirkan kehadiran manusia yang telah menghuni terlebih dahulu serta lingkungan yang melingkupinya.

h. Teori Optimalisasi

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.[16] Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

---

[14] Subandi. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Unit Penerbit Alfabeta. 2012

[15] Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: Mitra Wancana Media, 2005), 9-13

[16] Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

i. SWOT

SWOT adalah sebuah akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). SWOT merupakan sebuah bentuk metode analisis paling dasar untuk melihat topik masalah dari perspektif yang berbeda.[17] Manfaat SWOT adalah memberikan gambaran dari empat perspektif untuk pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai rujukan rencana jangka panjang.[18]

Tabel 3 : Matriks SWOT

d **Internal** **Eksternal**	**S (Stregth)** Tentukan faktof-faktor kekuatan internal	**W (Weakness)** Tentukan faktof-faktor kelemahan internal
O (Opportunity) Tentukan faktof-faktor peluang eksternal	**Strategi S-O** Gunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang	**Strategi W-O** Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
T (Threat) Tentukan faktof-faktor ancaman eksternal	**Strategi S-T** Gunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman	**Sretegi W-T** Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman

Sumber : Wardoyo, P. Alat Analisis Manajemen. 2011

Dari matriks tersebut Strategi S-O berarti strategi ditentukan dengan mengkombinasikan antara kekuatan dan peluang. Strategi ini dimaksudkan untuk penggunaan kekuatan dalam memanfaatkan peluang dengan maksimal. Strategi W-O berarti strategi ditentukan dengan mengkombinasikan antara kelemahan dan peluang. Strategi ini dimaksudkan untuk menekan faktor kelemahan dengan memaksimalkan pemanfaatan peluang. Strategi S-T berarti strategi ditentukan dengan mengkombinasikan kekuatan dan ancaman. Strategi ini dimaksudkan untuk penggunaan kekuatan secara maksimal dalam mengurangi ancaman. Strategi W-T berarti strategi ditentukan dengan mengkombinasikan antara kelemahan dan ancaman. Strategi ini dimaksudkan untuk meminimalisir faktor kelemahan dan menghindari ancaman yang menjadi potensi.

---

[17] Wardoyo, P. (2011). *6 Alat Analisis Manjameen.* Semarang: Semarang University Press
[18] Irham, Fahmi. (2015). *Manajemen Strategis.* Bandung: CV Alfabeta

Analisis SWOT dalam Taskap ini dipakai untuk membantu penulis dalam melihat strategi bagaimana meningkatkan pelayanan pada pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, analisis SWOT dilakukan bersama teori pembangunan ekonomi untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi sehingga urgensi dari optimalisasi pelayanan terlihat. Analisis SWOT mendukung teori optimalisasi untuk mendapatkan hasil bagaimana peningkatan dari pelayanan pelabuhan perikanan dalam membangun Kota Minapolitan di Indonesia.

10. Data dan Fakta

a. Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia

Perkembangan masalah lingkungan hidup di Indonesia, baik di daratan, perairan maupun udara sudah memasuki ambang gawat. Masalah lingkungan ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan.[19] Lingkungan hidup beberapa dekade akhir-akhir ini menjadi tempat perhatian dan bahan pengkajian terus-menerus baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita lestarikan dan tetap jaga kelanjutannya guna keberlangsungan kehidupan umat manusia. Dua hal paling essensial dalam kaitannya dengan persoalan pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Saat ini kerusakan lingkungan telah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang mengglobal. Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan upaya mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup serta diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan yang tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.[20]

---

[19] Zoer'aini Jalam, Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Mengehentikan Penyulutnya?, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal.103

[20] Sukandarrumidi, Bencana Alam dan Anthropogene, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hal. 37

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum lengkap bahkan cenderung pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Kenyataan seperti ini dapat dikatakan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena efek samping dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai progam pengelolahan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.[21]

Buangan dan air limbah berasal dari kegiatan industri adalah penyebab utama terjadinya pencemaran. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia harus menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:[22]

1) Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri.
2) Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang bisa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang.
3) Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Lingkungan yang tercemar secara langsung atau tidak langsung, lambat laun akan mengakibatkan kerusakan.

b. Kondisi Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Pelabuhan perikanan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Hal ini didasarkan pada fungsi pelabuhan perikanan yang menjadi ujung tombak proses penangkapan ikan hingga distribusi hasil tangkapan ke konsumen, sehingga pelabuhan perikanan memiliki fungsi strategis sekaligus ekonomis.

[21] Michael P Todaro dan Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan (Erlangga, 2006), hal. 588
[22] Ibid,,,

Dari sisi tata kelola pelabuhan, Indonesia masih dihadapkan kepada beberapa tantangan dalam optimalisasi fungsi dan sistem managemen pengelolaan. Tantangan sistem informasi dan manajemen operasional pelabuhan perikanan masih belum optimal dan profesional, perbaikan kualitas pendataan, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pengelolaan pelabuhan, pemanfaatan beberapa pelabuhan masih belum maksimal, dan konektivitas antar pelabuhan yang belum berjalan dengan baik. Untuk itu peran strategis pelabuhan perikanan perlu digalakkan kembali dalam kerangka meningkatkan *forward* dan *backward linkage*.[23]

Walaupun infrastruktur menjadi domain pemerintah pusat maupun daerah, namun peran dari swasta (pelaku usaha, asosiasi) maupun nelayan dalam menunjang dan mengembangkan infrastrukur yang ada menjadi penting. Kolaborasi pemangku kepentingan menjadi salah satu parameter yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur demi menunjang kegiatan setiap pemilik kepentingan.

Tabel 1 : Karakteristik Pelabuhan Perikanan di Indonesia

NO	KRITERIA	KELAS PELABUHAN PERIKANAN			
		KELAS A (PPS) PRIMER	KELAS B (PPN) SEKUNDER	KELAS C (PPP) TERSIER	KELAS D (PPI) LOKAL
1	Jumlah Kapal (unit/Hari)	100	75	30	20
2	Fasilitas tambat labuh untuk kapal berukuran (GT)	≥ 60	≥ 30	≥ 10	≥ 3
3	Fasilitas Pembinaan & Pengujian Mutu	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
4	Sarana Pemasaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
5	Ketersediaan di Indonesia	7	16	45	510

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan 2022

Dilihat dari kualitas dan jumlah pelabuhan perikanan yang tersedia saat ini masih belum mencukupi dan penyebarannnya belum merata

[23] Bappenas, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (2013). Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019.

dibandingkan dengan potensi yang ada antara Kawasan Indonesia Barat (80%) dan Kawasan Indonesia Timur (20%). Pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai baik jenis, kapasitas maupun mekanisnya.[24]

c. Kondisi Kota Minapolitan di Indonesia

Pengembangan Kota Minapolitan merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, membuka kesempatan kerja dan tempat berusaha masyarakat serta menekan laju urbanisasi. Minapolitan sebagai sebuah program yang diwujudkan melalui sistem kawasan minabisnis, minaindustri dan minawisata.

Pengembangan usaha tani nelayan dimulai dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan. Identifikasi kemungkinan dan masalah pemanfaatan ruang memperhatikan kemungkinan dan masalah yang mungkin terjadi di masa depan maupun saat ini. Identifikasi kemungkinan dan masalah ini membutuhkan komunikasi antara perencana dan mereka yang terpengaruh oleh rencana tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tujuan penggunaan tempat. Maksud dan tujuan penataan ruang harus mencerminkan visi masyarakat setempat. Selain itu, strategi dan kebijakan penataan ruang dikembangkan sesuai dengan peraturan tata ruang yang diberikan. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengurangi disparitas pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar daerah.

Kondisi saat ini aksebilitas di kawasan minapolitan belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengembangan minapolitan. Hal ini dikarenakan masih banyak didapatkan kondisi jalan yang belum memadai baik kelas jalan, kapasitas jalan maupun kualitas jalan. Kurangnya penyuluhan tentang kebijakan minapolitan di sekitar Pelabuhan Perikanan, masih banyak masyarakat atau nelayan yang tidak mengetahui tentang kebijakan minapolitan.

[24] Lubis, Ernani. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor, IPB Press.

11. Lingkungan Strategis

Pembangunan kawasan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan guna mewujudkan ekomoni biru sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis yang berdampak positif maupun negatif terhadap pembahasan permasalahan.

a. Global

Pembangunan kawasan pelabuhan perikanan secara global dapat dilihat dari meningkatnya sistem jaminan hasil tangkap ikan dan fungsi pendataan. Potensi pengembangan perikanan tangkap pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tagkap maupun peluang yang dapat diraih dengan mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan.

Di negara-negara Eropa, sebanyak 150 perusahaan industri pengolahan telah terkonsentrasi di pelabuhan perikanan, contohnya Perancis, Jerman dan sebagainya. Setiap pelabuhan perikanan di negara-negara tersebut memiliki kekuatan hasil tangkapan yang didaratkan, tidak hanya penting bagi nelayan sebagai penjual ikan, namun juga bagi pedagang ikan, pengolah ikan, pengelola pelabuhan dan pemerintah. Pelabuhan Perikanan Boulognesur Mer yang berada di Perancis telah menjadi pusat pengolahan ikan terbesar di Eropa. Ikan yang diolah tidak hanya berskala dari hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan tersebut tetapi juga mengimpor dari negera-negara tetangga.

Pengelohan perikanan di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara besar seperti China, Thailand dan Norwegia yang mengalami penurunan secara signifkan. Dengan peningkatan yang di alami Indonesia dapat dijadikan peluang bersaing dengan negera-negara eksportir perikanan dunia.

b. Regional

Pembangunan kawasan pelabuhan perikanan secara regional ditunjukan untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan pemanfaatan ruang. Pengembangan ruang dengan pemanfaatan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan di Asia

dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keunggulan wilayah regional serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dengan dukungan lingkungan perubahan iklim.

Indonesia menjadi pelopor kerja sama di tingkat ASEAN untuk penerapan ekonomi biru yang lebih terintegrasi karena Indonesia menjadi ketua dalam KTT ASEAN pada tahun 2023 dan kapasitas Indonesia sebagai negara maritim terbesar. Indonesia dapat menentukan agenda dan capaian yang harus diraih sebagai penyusun rencana regional dengan memasukkan *blue economy* sebagai salah satu agenda yang harus dibahas dalam KTT ASEAN 2023. Indonesia menjadi formatur kebijakan dan kerangka kerja ekonomi biru agar komitmen negara anggota tidak sebatas pada deklarasi secara kolektif saja, tetapi dapat berjalan hingga tahap implementasi. Kerangka kerja dalam implementasi ekonomi biru ini dapat berupa kerja sama baik antarnegara anggota, subregional, maupun ASEAN secara keseluruhan. Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menjaga stabilitas keamanan di perairan Asia Tenggara mengingat persoalan keamanan di wilayah laut merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi biru.

c. Nasional

Pembangunan kawasan pelabuhan perikanan secara nasional dapat dilihat dengan peningkatan inovasi dan kualitas investasi yang merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan serta mensejahterakan secara adil dan merata bagi masyarakat sekitar pelabuhan perikanan. Kegiatan kelautan dan perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan akses kualitas konsumsi pangan.

Karakteristik geografis dan kandungan sumberdaya perikanan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan (justifikasi) bahwa Indonesia merupakan negara bahari dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki

peluang potensial untuk dimanfaatkan dan dikelola guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelabuhan perikanan yang merupakan pusat industri perikanan merupakan bagian penting dari sistem perikanan laut dan harus digunakan dan dikelola sebaik-baiknya. Pelelangan ikan merupakan kegiatan utama di pelabuhan perikanan dan kegiatan ini berdampak signifikan terhadap pendapatan dari penjualan nelayan, sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal. Pelelangan ikan merupakan satu-satunya mekanisme pemasaran ikan yang bertujuan untuk memberikan harga yang wajar baik kepada nelayan maupun pedagang, meskipun kegiatan ini tidak banyak dilakukan di pelabuhan perikanan Indonesia.[25]

Terdapat beberapa pelayanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai baik pelayananan barang kebutuhan kapal, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi. Kehadiran Kawasan Minapolitan dalam perwujudan ekonomi biru memungkinkan para nelayan untuk dapat mengembangkan industri perikanannya, melindungi ekosistem perairan dan melanjutkan aktivitas sebagai nelayan.

Pengembangan kawasan merupakan usaha memberdayakan pihak pemerintah (*stakeholders*) pusat dan daerah dengan teknologi untuk memberi nilai tambah (*added value*) yang dimiliki oleh wilayah administratif / fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Pengembangan wilayah / otonomi daerah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kota Minapolitan merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah pesisir serta membangun ketahanan pangan aspek laut pada wilayah tersebut.

[25] Lubis, Ernani. Op. Cit., h. 3

BAB III
PEMBAHASAN

12. Umum

Pelabuhan perikanan mempunyai peran yang penting terhadap perkembangan produksi perikanan laut di Indonesia, karena merupakan pusat kegiatan perekonomian perikanan tangkap mulai saat ikan didaratkan hingga dipasarkan. Pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perikanan tangkap yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola dengan baik. Bentuk pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh pelabuhan perikanan adalah pelayanan barang, jasa dan administrasi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki laut luas serta kekayaan alam bawah laut belimpah yang dapat di jadikan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitarnya, perlu adanya peningkatan pelayanan kepelabuhanan perikanan yang dibutuhkan masyarakat nelayan. Dengan visi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dan pembangunan kawasan minapolitan dalam mewujudkan ekonomi biru, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

13. Peningkatan Jumlah dan Penataan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan diperlukan dalam rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri perikanan baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang seimbang, merata dan proposional. Fungsi pelabuhan perikanan yang komprehensif akan menunjang aktivitas ekonomi kelautan lainnya yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga pelayanan pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi kepada masyarakat.

Investasi yang ditanamkan untuk pembangunan pelabuhan perikanan cukup besar sehingga keberhasilan operasionalnya harus diperhatikan walaupun diketahui bahwa pengusahaan pelabuhan termasuk yang sifatnya *slow yielding* atau pengembalian investasi memerlukan waktu yang cukup lama. Di sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia, pendapatan yang dihasilkan belum dapat menutupi biaya operasionalnya atau setidaknya bisa seimbang, hal ini

dikarenakan pengelola masih mementingkan fungsi publik atau fasilitas tidak dikomersialkan seperti halnya pelabuhan dikelola oleh swasta. Dengan semakin pentingnya peran pelabuhan perikanan terhadap aktivitas perikanan laut maka pemerintah sebagai pengelola harus terus memperhaikan pembangunan, pengelolaan dan pengembangannya.

Pelabuhan perikanan yang mengacu pada konsep ekonomi biru, disamping berfungsi sebagai tempat ekonomi baru yang berkelanjutan atau tempat tukar-menukar dan keluar masuknya barang perdagangan, juga menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitan suatu wilayah atau kota karena adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dari konsep ini diperoleh pengertian bahwa ada hubungan antara *hinterland* dengan aktivitas suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah *hinterland* maupun *foreland,* pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume perdagangan dan menarik kapal-kapal dari dan ke daerah pedalaman. Operasionalisasi pelabuhan pada hakekatnya merupakan sebuah system yang terdiri dari beberapa subsistem dan didalamnya juga didukung oleh subsubsistem yang lebih kecil. Semua ini berlangsung dalam hubungan yang saling terkait dan didukung oleh *net of transportation* yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah *hinterland* berupa jalan raya serta fasilitas yang ada di sekitar pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan *interface* antara perikanan di laut (penangkapan) dengan aktivitas perikanan di darat (pengelolaan dan pemasaran). Dengan demikian, pelabuhan perikanan menjadi pusat aktivitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha pendukung lainnya seperti penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain. Untuk itu, keberadaan infrastruktur sangat menunjang bagi operasional pelabuhan maupun keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalamnya. Ketersediaan infrastruktur menjadi stimulus dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi.[26] Indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemapanan infrastruktur, termasuk daya saing dan efisiensi pelabuhan yang berskala internasional.

[26] Hill, H. The Indonesian Economy. 2000, Cambridge: Cambridge Univerty Press.

Menurut Sulistyono[27] analisis tingkat kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan pantai dimodifikasi dengan membagi tiga kelompok fasilitas yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Masing-masing kelompok fasilitas dinilai kelengkapannya apakah masuk dalam kategori baik sekali, baik, cukup, buruk, dan buruk sekali.

Keberadaan fasilitas dalam menunjang aktivitas terhadap 42 Pelabuhan Perikanan Pantai didasarkan pada fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Untuk mengetahui ada tidaknya seluruh fasilitas beserta kondisi fasilitas tersebut, penulis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas yang ada dan tidak ada di Pelabuhan Perikanan Pantai.

Dalam menganalisis kondisi fasilitas dari ke 42 Pelabuhan Perikanan Pantai digunakan tabel dengan indikasi penentuan kondisi layak pakai, melampaui kapasitas, dan tidak dapat digunakan. Hal ini dikaitkan dengan luas bangunan fasilitas yang disesuaikan dengan penggunaannya dan kondisi fisik bangunan secara nyata. penetapan interval persentase kondisi fasilitas yang berlaku untuk semua kelompok fasilitas. Persentase yang diperoleh perkelompok fasilitas menentukan kategori penilaian. Kategori dan interval persentase kondisi fasilitas adalah sama untuk semua kelompok fasilitas.

Penetapan interval persentase kondisi fasilitas yang berlaku untuk semua kelompok fasilitas. Persentase yang diperoleh perkelompok fasilitas akan menentukan kategori penilaian. Kategori dan interval persentase kondisi fasilitas adalah sama untuk semua kelompok fasilitas. Analisis keberadaan dilakukan dengan mentabulasi fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada dan tidak ada, sedangkan analisis kebutuhan yaitu dengan mentabulasi fasilitas yang ada dan diperlukan (ADP), ada namun belum diperlukan (ANBP), belum ada namun diperlukan (BANP), dan belum ada namun belum diperlukan (BANBP) dalam menunjang aktivitas (pendaratan, penanganan, pengolahan ikan, pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, administrasi dan penyuluhan, serta penyaluran perbekalan) di Pelabuhan Perikanan Pantai. Banyaknya kategori penilaian disesuaikan dengan jumlah fasilitas yang seharusnya ada dalam menunjang aktivitas di Pelabuhan Perikanan Pantai.

---

[27] Sulistiyono. Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik VINYL Di Yogyakarta. 2015. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Gambar 1 : Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai

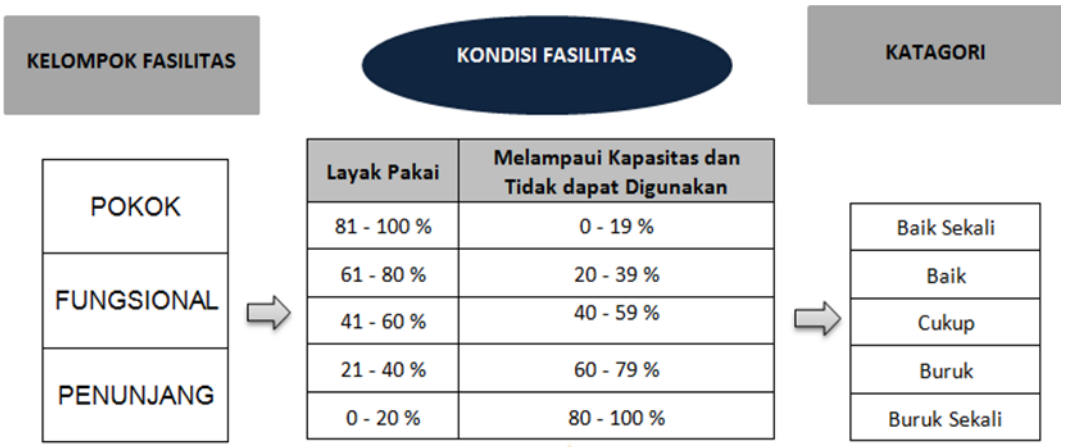

Sumber: Novianti, 2008

Fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Pantai dengan kapasitas yang ada memiliki hubungan erat dengan efektifitas Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai pusat kegiatan perikanan. Tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan dan fasilitas yang sudah tidak memenuhi kapasitas dapat menghambat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan komponen penting dalam kelancaran kegiatan operasional yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Ketiga fasilitas memiliki peranan sendiri dalam kegiatan operasional pelabuhan.

Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang dibutuhkan kapal dalam aktivitas keamanan dan kelancaran keluar masuk (bongkar dan muat). Fasilitas fungsional berfungsi untuk memberikan pelayanan kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti kantor, gedung TPI dan lain-lain. Fasilitas penunjang berfungsi mendukung kegiatan pelabuhan perikanan, mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan.

Kapal perikanan dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain, uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat dihitung berdasarkan etmal. Etmal adalah satuan dimana 1 etmal sama dengan 24 jam atau 1 hari, fasilitas tambat berupa jembatan, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai mapun pantai, tubuh kapal lain.

Kolam pelabuhan adalah bagian dari sarana dan fasilitas pelabuhan berbentuk perairan yang mempunyai kedalaman dan berada di depan dermaga. Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan *berth time* (waktu sandar) selama dalam pelabuhan, bongkar muat barang, pengisian ulang bahan bakar, air bersih, perbaikan dan lain-lain dengan mudah tanpa terganggu oleh gelombang. Kolam pelabuhan dapat diklasifikasikan sebagai kolam pendaratan, kolam perbekalan, kolam tambat, dan kolam manuver.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan Perikanan Tangkap Terukur dengan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan dilakukan dengan memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Upaya peningkatan yang dilaksanakan adalah:

a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan serta penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.

b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*major project*) dengan berkoordinasi kepada K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap dan pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).

c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas, pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) dan artisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).

d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain terkait.

e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*major project*) berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan dan pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.

Strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat di gunakan dalam peningkatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan, sehingga optimalisasi tersebut dapat memudakan masyarakat pengguna pelabuhan perikanan dalam memberdayakan fasilitas yang ada.

14. Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan

Pelayanan pelabuhan perikanan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan *good governance* yang transaparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif dan efisien. Terwujudnya *good governance* dapat tercapai apabila komitmen jelas dan kuat tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja pada instansi Pelabuhan Perikanan.

Prosedur Operasional Standar (POS) menjadi kebutuhan dasar dalam mewujudkan *good governance*, karena POS memiliki dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pedoman melaksanakan tugas sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Secara ekternal berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi publik yang

berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, menilai kinerja organisasi public di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan teori pelayanan publik, untuk meningkatkan pelayanan dapat diukur melalui beberapa katagori sebagai berikut :

a. Peningkatan Organisasi Pelayanan

Berdasarkan teori organisasi yang merupakan jaringan tata kerja kelompok orang-orang secara teratur dan berlanjut untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan di dalamnya terdapat tata cara bekerjasama dan hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi tidak hanya sekedar wadah tetapi juga terdapat pembagian kewenangan, siapa mengatur apa dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Dari sudut pandang obyektif, organisasi berarti struktur, sedangkan berdasarkan pandangan subyektif, organisasi berarti proses. Secara obyektif menekankan pada struktur, perencanaan, kontrol, dan tujuan serta menempatkan faktor-faktor utama ini dalam suatu skema adaptasi organisasi, sedangkan secara subyektivis mendefinisikan organisasi sebagai perilaku pengorganisasian (*organizing behaviour*).

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, mengacu Peraturan Menteri Pandayaguanaan Aparatur Negara Nomor: Per.13/MenpanRB/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, konsep dan prinsip kepemerintahan yang baik *(good governance)* telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian tersebut dapat dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Gambar - 2 : Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai

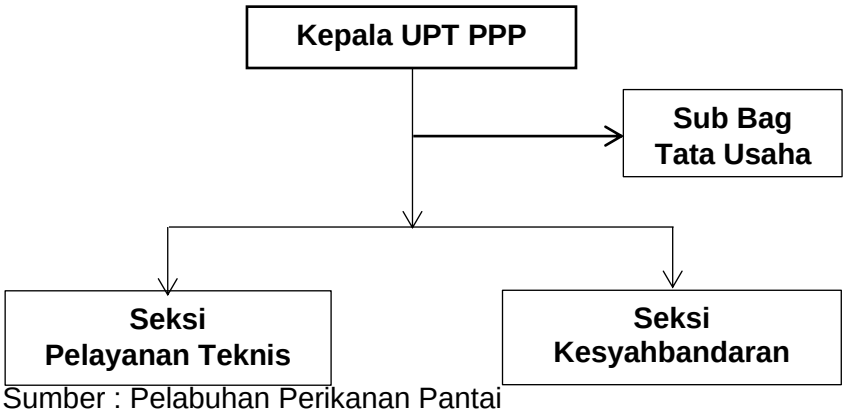

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa sistem pelayanan dapat terarah dan sejalan dengan apa yang ada di dalam teori organisasi dimana unit kerja bekerja atas dasar relatif yang terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam pelayanan pelabuhan perikanan para pengguna dapat melalui kesyahbandaran dalam mengurus segala keperluan administrasi dimana dari kesyahbandara di lanjutkan ke kebagian tata usaha selanjutnya ke kepala unit untuk dapat persetujuan dari administrasi tersebut. Pelayanan ini dapat dilakukan lebih efisien dalam model Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat lebih partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya organisasi serta mengkoodinir pelayanan masyarakat di pelabuhan perikanan, dengan itu para pengguna jasa tidak harus melakukan perjalanan yang jauh untuk mendatangi kantor-kantor pelayanan kepelabuhan karena diharapkan pelayanan tersedia di sekitar kawasan pelabuhan perikanan.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi memegang peran sangat penting. Dengan sumber daya manusia, sebuah organisasi mampu menjalankan usaha atau kegiatan organisasi tersebut. Dengan tenaga kerja yang memiliki keterampilan akan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas sebagai instansi pemerintah dengan baik, selain itu sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat kegiatan dari perencanaan sampai dengan evaluasi dimana sumber daya

manusia tersebut memanfaatkan sumber daya-sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Pemanfaatan potensi setiap sumber daya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang optimal.

Budaya organisasi sebagai salah satu sistem nilai yang dianut dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas pegawai dalam organisasi dimana pegawai yang terlibat dalam organisasi merupakan sumber utama budaya organisasi karena seseorang hanya akan bergabung dalam organisasi yang dirasakan sesuai, demikian pula sebaliknya, organisasi hanya akan menerima pegawai yang sesuai dengan nilai-nilai dalam organisasi. Dalam hal ini suatu organisasi dalam rekruitmen pegawai telah memilih calon yang secara kualitas dan kuantitas dibutuhkan sesuai profesi.

Kinerja karyawan merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan di pelabuhan perikaan karena kinerja karyawan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan dalam menghadapi kebutuhan masyarakat. Penilaian kinerja merupakan proses kontrol kinerja karyawan yang dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Penilaian kinerja dilakukan secara efektif untuk mengarahkan perilaku karyawan dalam rangka menghasilkan jasa dengan kualitas yang tinggi. Karyawan Pelabuhan Perikanan Pantai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerjanya mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat keterbatasan kemampuan karyawan yang ada, sehingga hasil kerja tidak berjalan sesuai target. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap hasil kerja organisasi secara keseluruhan yang menyebabkan kinerja karyawan tidak berjalan sesuai sasaran yang telah ditentukan.

c. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik

Peningkatan produksi sumber daya perikanan akan bermuara pada kesejahteraan nelayan, pada prosesnya perlu dukungan peningkatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, serta pengembangan faktor-faktor lain yang dapat mendukung peningkatan kinerja pelabuhan seperti peningkatan

kualitas SDM dan pemeliharaan sumberdaya ikan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala tentang tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional untuk peningkatan produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai. Optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di sekitar pelabuhan perikanan dalam mendukung mewujudkan ekonomi biru.

Fasilitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan elemen masyarakat serta para akademisi yang bisa memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan. Masyarakat dapat menerima fasilitas pelayanan yang telah diberikan dan dapat dijaga dengan baik.

d. Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

Berdasarkan teori pelayanan publik bahwa rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pelayanan public dalam bentuk barang, jasa dan administrasi. Dalam hal ini pelayanan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh UPT Kepelabuhanan serta instansi lain dilaksanakan masing-masing. Sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi agar tidak menempuh perjalanan yang jauh dari kawasan pelabuhan perikanan ke instansi pelayanan berada di Provinsi maka perlu transformasi model pelayanan yang lebih sederhana, efisien, cepat dan murah.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai pengguna jasa pelayanan di pelabuhan. Nelayan menginginkan pelayanan yang professional dari pengelola pelabuhan, oleh karena itu setiap pelabuhan perikanan dituntut dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Pelayanan yang diberikan pelabuhan perikanan antara lain berupa pelayanan barang, jasa dan administrasi.

Peningkatan pelayanan pada pelabuhan perikanan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, dimana para nelayan dapat melakukan prosedur administrasi di satu tempat tanpa harus ke luar kecamatan ataupun kota untuk mendatangi kantor pelayanan yang lain. Untuk mencapai prosedur pelayanan terpusat pada satu lokasi, model pelayanan kepelabuhanan perikanan perlu transformasi ke model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / *One Stop Service* sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat secara transparan dan berkualitas. Hal ini juga membuka peluang investasi secara keberlanjutan guna mewujudkan kerja sama dengan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan yang lain serta menumbuhkan peluang pengembangan usaha masyarakat.

Gambar 3 : Proses Pelayanan Perizinan PTSP di KKP

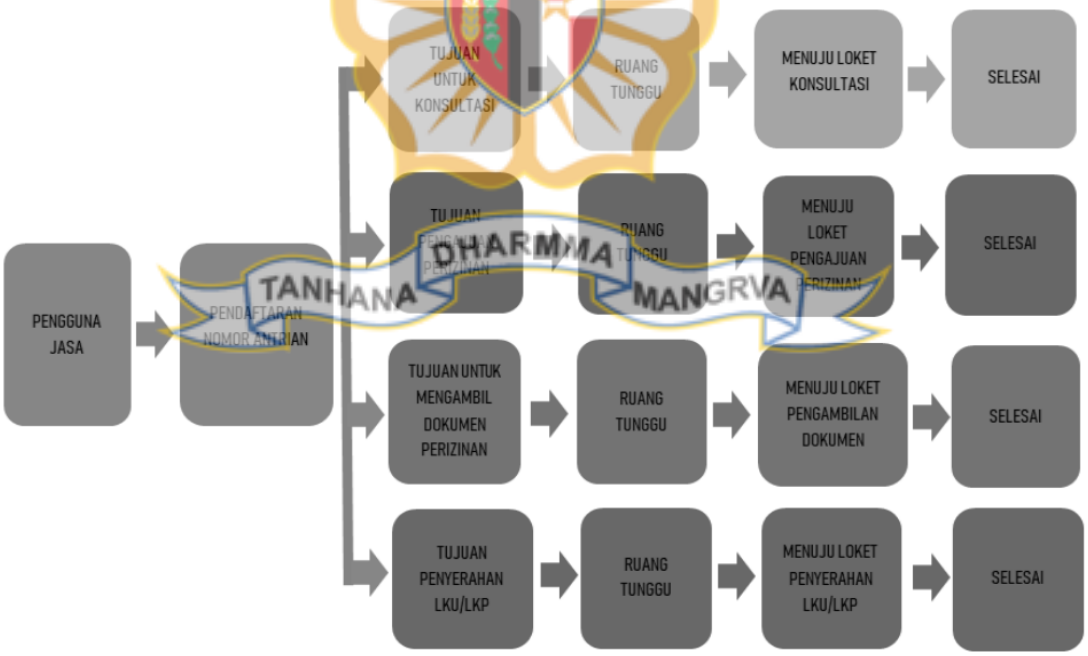

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar - 4 : Proses Pelayanan Pengaduan PTSP di KKP

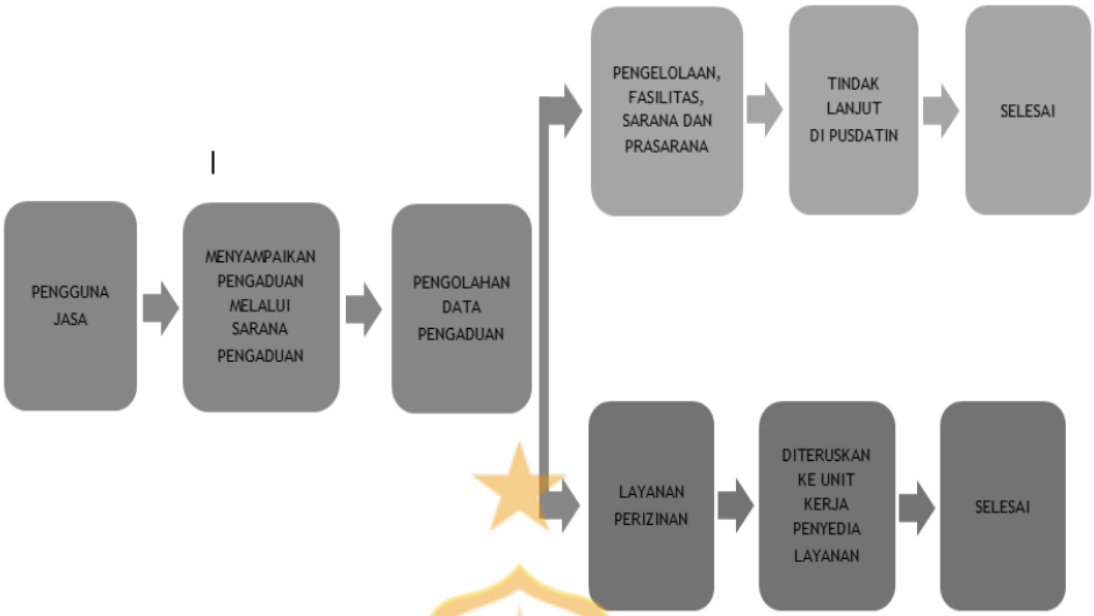

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar di atas menunjukkan proses pelayanan PTSP di Pelabuhan Perikanan baik di bagian perizinan maupun pengaduan. Melalui prosedur tersebut para nelayan dapat dengan mudah mengikuti alur yang sudah ditetapkan dan mendapatkan pelayanan dengan cepat, tepat dan efisien.

15. Pembangunan Kota Minapolitan Ramah Lingkungan

Pembangunan Kawasan Minapolitan tidak ditentukan dengan batasan dari wilayah administratif pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale dan economic of scope*. Karena itu, penetapan Kota Minapolitan dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan minabisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk dan luasan kawasan Minapolitan dapat meliputi suatu wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau beberapa Kecamatan dan dalam Kabupaten/Kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah Kabupaten/Kota lain. Kota Minapolitan dapat berupa kota desa atau kota nagari atau kota kecamatan atau kota kecil atau kota menengah.

Abstraksi Kawasan Minapolitan tersebut dapat digambarkan secara skematis pada gambar di bawah ini :

Gambar - 5. Skema Kawasan Minapolitan

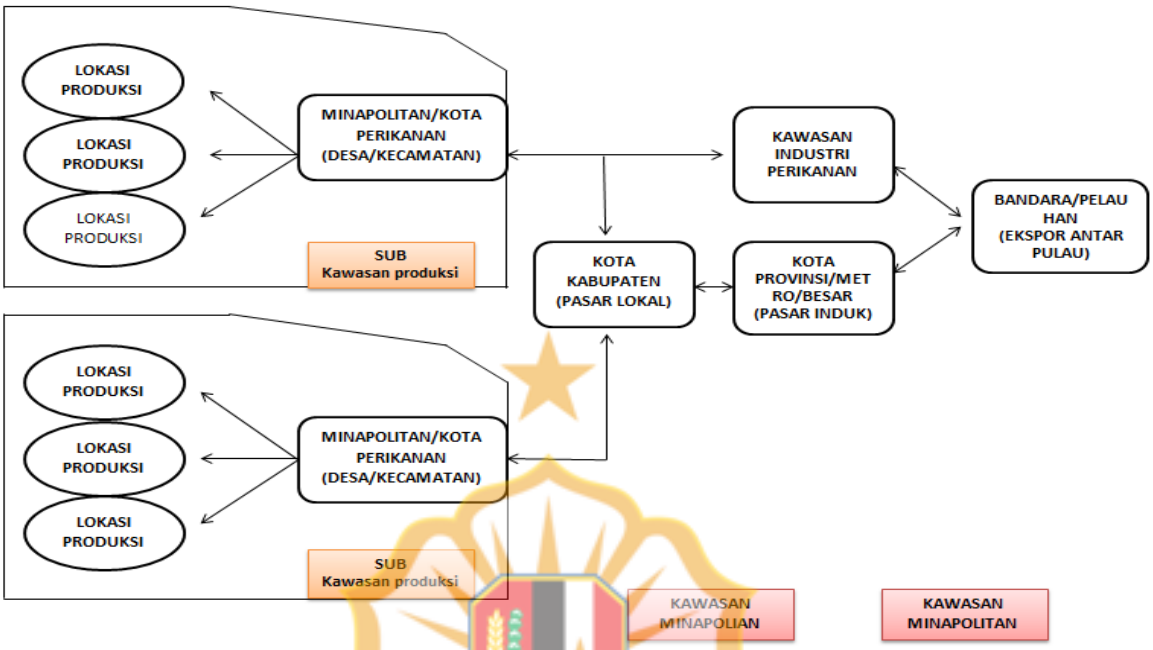

Sumber : Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan, Departemen Perikanan dan Kelautan, 2009

Pengembangan kawasan minapolitan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional yaitu : a) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah; b) memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing, mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya perikanan tangkap dan budidaya; c) mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelaku usaha sesuai dengan semangat otonomi daerah; dan d) mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah (khususnya budidaya ikan) dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak dan memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Minapolitan masuk pada kategori Agropolitan. Kawasan Agropolitan/Minapolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan Minapolitan sebagai demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara yang terbatas, dan pemberdayaan daerah dengan prinsip daerah kuat, negara kuat, bangsa kuat. Ketiga prinsip tersebut merumuskan strategi dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber dayanya dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah sebagai pusat pembangunan. Mesin ekonomi utama Minapolitan berupa pusat manufaktur dan perdagangan untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan atau kombinasi keduanya.

Mengacu pada Permen KP Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam mempercepat pengembangan kawasan minapolitan salah satunya melalui sinergi pendanaan 19 bidang DAK (Bidang Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Air Minum, Pendidikan, Listrik Pedesaan, Keselamatan Transportasi Darat, Transportasi Pedesaan, Sarana Daerah Tertinggal, Prasarana Pemda, Kawasan Perbatasan, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Pertanian, Keluarga Berencana dan Kesehatan) yang difokuskan di kawasan Minapolitan tersebut. Sinergi dana yang dihimpun oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten / Kota yang dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota untuk mempercepat pertumbuhan daerah.

Pembagian wilayah atau regionalisasi wilayah nasional merupakan satuan geografi (atau daerah administrasi) sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas dimaksudkan untuk prasarat dalam pemerataan pembangunan. Pengembangan wilayah atau *regional planning* adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya.

Berbagai segi tersebut meliputi ekonomi, sosial dan budaya, ilpengtek maupun fisik. Hal yang paling penting dilakukan oleh seorang *regional planner* ialah menyelaraskan struktur hubungan spasial dari suatu aktifitas ekonomi dengan aktifitas lainnya. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan keserasian dan keseimbangan antar pembangunan sektoral dengan regional, keseimbangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan *hinterland* serta hubungan antara kota dan desa

Tingkat perkembangan wilayah (*regional growth*) dapat diukur dalam 3 indikator yaitu karakteristik sosio-ekonomi dan demografi. Ketiga indikator diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik (fasilitas) minimum, PDRB, investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk, kontribusi industri dan produksi diukur melalui prosentase penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersil, luas total lahan, produktivitas serta transportasi yang diukur melalui kualitas kepadatan dan tipe panjang jalan.

Pertumbuhan wilayah dapat diukur dari indikator-indikator seperti pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita atau PDRB, dan Perubahan struktur spasial wilayah. Pemerintah indonesia dalam mewujudkan kawasan Minapolitan telah membagi wilayah yang ada di Indonesia dengan beberapa kawasan perikanan tangkap.

Pembangunan Kawasan Minapolitan di pelabuhan perikanan Indonesia dapat berkembang dengan adanya beberapa faktor yang mendukung, seperti:

a. Kelembagaan

Lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pengelola Sumber Daya Kawasan. Fungsi lembaga pemerintah ini untuk menghubungkan antara pemerintah dan nelayan sebagai pembina dalam penyuluhan dan pelatihan sumber daya manusia bagi Kelompok Usaha Bersama Nelayan.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun para nelayan. Keberadaan HNSI berperan dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi nelayan, ketika terjadi konflik atau persengketaan.

Kelompok Usaha Bersama Nelayan merupakan wadah bagi para nelayan untuk memperoleh informasi tentang usaha perikanan baik antar sesama KUB maupun dari pemerintah daerah. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan terkait kegiatan perikanan tangkap. KUB merupakan kelompok nelayan yang terdiri dari 10 orang.

Kelembagaan pemerintah dan swasta/masyarakat nelayan telah memiliki kerja sama yang baik sesuai peran masing-masing. Namun demikian, koordinasi antar lembaga pemerintah selaku pengelola/kelompok kerja minapolitan dinilai kurang. Hal yang sering terjadi adalah sengketa dengan nelayan daerah lain.

b. Permodalan

Lembaga permodalan merupakan lembaga yang dapat memberikan fasilitas bantuan permodalan kepada nelayan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap atau perikanan budidaya maupun unit usaha pengolahan perikanan. Bantuan permodalan dari pemerintah diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB). Akses permodalan / fasilitas peminjaman hanya terbatas untuk nelayan yang memiliki agunan.

c. Penyuluhan

Pelabuhan Perikanan dapat menyediakan fasilitas gedung Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan dan tenaga penyuluh perikanan sejumlah 3 orang. Kegiatan pendidikan dan penyuluhan perikanan dilakukan karena belum banyak nelayan yang mengetahui Minapolitan dan bagaimana mengembangakan Kawasan Minapolitan untuk mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Inisiatif ini dapat datang dari nelayan yang memiliki pengetahuan atau dari pemerintah. Dengan adanya sosialisasi maupun penyuluhan pelabuhan perikanan dalam pengembangan Kawasan Minapoltan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sarana belajar bagi nelayan dan masyarakat sekitar kawasan.

Prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan hasil produksi perikanan di Kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:

a. Cold Storage

Pengadaan *Cold Storage* dimaksudkan sebagai upaya dalam menerapkan prinsip dasar penaganan produk perikanan sebagai mata rantai dingin (*cold chain*). Diharapkan produk-produk perikanan setelah penangkapan atau setelah panen memiliki tempat penyimpanan sementara sebelum didistibusikan ke konsumen sehingga produk bisa awet dan masih tetap segar sampai ke konsumen.

b. Pabrik es

Penyediaan pabrik es dalam Kawasan Minapolitan diarahkan untuk mendukung proses penanganan pasca panen pada penangkapan ikan. Dalam hal ini dengan adanya pabrik es di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dapat memudahkan pelaku usaha perikanan mendapatkan pasokan es balok yang selama ini mengharuskan kesulitan dalam mendapatkan pasokan es balok.

Ketersediaan es diperlukan untuk dapat mempertahankan mutu produk selama proses panen dan didistribusi produk ke pasar atau ke konsumen. Kondisi yang baik dapat pula digunakan para nelayan untuk mengawetkan ikan, tapi arah pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perlu pembangunan pabrik es dan *Cold Storage* untuk mendukung kebutuhan pengembangan Kawasan Minapolitan.

c. Gudang Pengolahan

Gudang penyimpanan/pengolahan merupakan sarana pendukung pelaksanaan program pengembangan komoditas. Penyediaan gudang ini dipergunakan untuk menjaga kualitas ikan yang telah dikeringkan, menjamin kontinuitas pemasaran dari petani, serta mendukung pemasaran keluar dalam skala besar sehingga dapat menjamin stabilitas harga. Gudang penyimpanan di tempatkan pada masing-masing lokasi dalam kawasan *hinterland.*

d. Lapangan penjemuran Jala/Ikan

Lapangan tersebut terletak di daerah yang bersentuhan langsung dengan daerah pantai. Fasilitas pendukung lapangan penjemuran jala maupun ikan sudah tersedia di beberapa kawasan minapolitan walaupun belum optimal digunakan oleh masyarakat setempat. Lapangan penjemuran

jala/ikan ini digunakan untuk menjemur jala yang sudah dipakai agar tidak bau amis. Selain itu, lapangan tersebut dipakai untuk menjemur ikan yang diolah sebagai ikan asin atau ikan kering oleh masyarakat setempat. Untuk menjamin kualitas ikan hasil tangkapan dibutuhkan upaya penanganan pasca panen yang optimal. Sarana pengeringan ikan dimaksud adalah para-para, yakni sarana penjemuran ikan yang biasanya terbuat dari bahan kayu dan waring. Ukuran dan desain 1 unit para-para penjemuran ikan bermacam-macam umumnya berukuran 4 x 8 m. Unit para-para dilengkapi dengan terpal pelindung dan gerobak pengangkut. Penyediaan sarana penjemuran ini diarahkan pada masing-masing lokasi sentra perikanan tangkap dalam kawasan *hinterland*.

e. Tempat pelelangan ikan (TPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan dan tempat pelelangan ikan merupakan fasilitas penunjang pengembangan perikanan tangkap serta fasilitas penunjang pemasaran hasil perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dalam hal ini keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan pelelangan ikan dapat berperan sebagai lokasi-lokasi pemasaran sehingga mendorong roda ekonomi sekitar Kawasan Minapolitan. Dengan demikian, melihat fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan dan tempat pelelangan ikan ini maka dalam mendukung program pengembangan Kawasan Minapolitan perlu dibangun sarana Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Pusat Pertumbuhan atau merevitalisasi PPP yang telah ada. Tempat pelelangan ikan merupakan saluran transportasi yang penting dalam pengembangan kegiatan perikanan. Prasarana ini merupakan pusat pelayanan transportasi hasil perikanan dan tempat pelayanan kegiatan operasional, pusat pembinaan dan pemasaran hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya perikanan serta tempat pengembangan industri perikanan/pelayanan ekspor.

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung dalam Kawasan Minapolitan merupakan instrumen kunci yang sangat berpengaruh dalam pembangunan kawasan minapolitan. Seluruh tahapan dalam pembangunan kawasan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana, mulai dari proses

penyediaan sarana produksi, proses, pengolahan sampai proses pemasaran hasil, termasuk dukungan jasa institusi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pengembangan komoditas basis di Kawasan Minapolitan. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan komoditas basis Minapolitan pelabuhan perikanan meliputi:

a. Akses Jalan, Terminal dan Pelabuhan

Aksesbilitas di kawasan pengembangan Minapolitan merupakan salah satu infrastuktur yang vital dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program Minapolitan. Guna mendukung pengembangan komoditas basis pengembangan kawasan Minapolitan dibutuhkan beberapa revitalisasi jalan arteri dan pembukaan akses jalan produksi. Kategori jalan arteri digunakan untuk jalan yang menghubungkan antara kawasan pusat pertumbuhan dengan kawasan sentra produksi (*Hinterland*) di sekitarnya, selain itu juga diperlukan pembukaan dan perbaikan beberapa jalan produksi di kawasan lokasi-lokasi produksi dan sentra produksi. Jalan produksi diutamakan pada lokasi-lokasi yang masih terisolasi melalui transportasi darat. Selain akses jalan darat, dalam pengembangan infrastruktur di kawasan Minapolitan, juga diperlukan pembangunan terminal, tempat pendaratan hasil budidaya dan pelabuhan rakyat. Ketersediaan terminal di kawasan Pusat Pertumbuhan akan memacu roda perekonomian di kawasan pengembangan Minapolitan. Ketersediaan tempat pendaratan hasil perikanan akan mendorong pemusatan produksi. Demikian pula halnya dengan pelabuhan di kawasan pusat pertumbuhan akan memudahkan akses pemasaran hasil perikanan.

b. Sumber air bersih dan daya listrik

Fasilitas air bersih dan listrik merupakan persoalan penting dalam program pengembangan Kawasan Minapolitan. Dimana pada beberapa wilayah penunjang produksi (*hinterland*) Minapolitan belum atau sangat terbatas memiliki sarana air bersih dan dukungan daya listrik. Olehnya itu, dalam pengembangan Kawasan Minapolitan diperlukan pembangunan sarana air bersih dan listrik untuk menunjang aktivitas produksi.

c. Balai Pelatihan / Penyuluhan

Salah satu *grand strategi* pembangunan sektor perikanan kelautan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam

hal ini peningkatan produksi komoditas kelautan perikanan juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan. Olehnya itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan program pembangunan Balai Pelatihan / Penyuluhan di kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan penunjang produksi (*Hinterland*). Pembangunan balai ini juga harus dilengkapi dengan fasilitas informasi dan teknologi seperti jaringan telepon dan internet serta penempatan petugas penyuluh atau pendamping.

d. Pendidikan

Dalam membangun sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyediaan sarana pendidikan khususnya sekolah setingkat lanjutan tingkat atas sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan. Sarana pendidikan ini dapat berupa sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan yang ditempatkan pada kawasan pusat pertumbuhan. Pengembangan sarana pendidikan kejuruan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia anak-anak pelaku usaha kelautan perikanan sehingga dapat mewujudkan peningkatan SDM secara berkesinambungan.

e. Kesehatan

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan pengembangan Minapolitan merupakan infrastruktur kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan. Kesehatan pelaku usaha kelautan perikanan tentunya akan berdampak positif kepada produktivitas usaha yang dijalankan. Sarana prasarana kesehatan dimaksud adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pusat Kesehatan Desa (PUSKEDES). Pembangunan sarana prasarana kesehatan dan penyediaan fasilitas pendukungnya serta penempatan tenaga medis diarahkan pada setiap wilayah Pusat Pertumbuhan dan kawasan *hinterland*. Untuk rumah sakit dapat diarahkan pada kawasan pusat pertumbuhan, Puskesmas pada kawasan penunjang sentra produksi (*hinterland*), serta Pustu dan Puskesdes pada kawasan sub-sub *hinterland*.

Gambar - 6 : Zona Ruang Kawasan Minapolitan

Sumber : Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP 2011

Pengembangan Kawasan ini dititikberatkan pada upaya penataan ruang dalam pembagian wilayah penangkapan bedasarkan armada penangkapan ikan antara perikanan skala kecil, skala menengah, dan skala besar di wilayah perikanan Indonesia. Konsep yang digunakan dalam perencanaan kawasan perikanan tangkap adalah perencanaan kawasan yang terpadu dengan pertimbangan sistem yang terintegrasi yang mampu mendukung kebutuhan skala pelayanan lokal-regional-internasional, serta mampu mendukung fungsi utama kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sistem integrasi pengembangan kegiatan industri pelabuhan perikanan dan perdagangan produk hasil perikanan. Kawasan pelabuhan perikanan dibangun di daerah sentra-sentra kegiatan Pelabuhan Perikanan. Adanya sistem yang terintegrasi diharapkan dapat merangsang dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut serta pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Nelayan dan perusahaan perikanan. Selain itu, kawasan ini juga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian perikanan dan sektor lainnya seperti perdagangan, pariwisata dan industri penunjang perikanan, di bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja untuk kegiatan di kapal, yang hasil akhirnya meningkatkan

kesejahteraan nelayan. Dampak positif lainnya adalah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa Negara dari sektor perikanan dan kelautan, serta terkendali dan terawasinya pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI).

Berdasarkan gambar diatas yang disusun oleh pemerintah setidaknya ada beberapa zona yang diperhatikan dalam Kawasan Minapolitan, khususnya Minapolitan yang rama lingkungan, serta zona kolam untuk melabuh kapal-kapal, biasanya kawasan Minapolitan harus memiliki fasilitas penunjang, permukiman masyarakat setempat, rawa untuk melindungi kawasan dari pasang laut. Dengan adanya draf tersebut dapat di jadikan sebuah acuan dalam mengebangkan kawasan minapolitan guna mewujudkan ekonomi biru.

Analisis SWOT Pembangunan Kota Minapolitan Ramah Lingkungan

Analisis SWOT ini dilakukan dengan menggunakan dan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan, kemudian ditentukan strategi yang dapat diambil dalam rangka pengembangan Kawasan Minapolitan. Analisa faktor eksternal merupakan penganalisaan lingkungan eksternal Kawasan Minapolitan Pelabuhan Perikanan yang berguna untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman terhadap Kawasan Minapolitan tersebut. Berikut adalah analisis faktor eksternal pengembangan Kawasan Minapolitan Pelabuhan Perikanan.

Untuk menentukan kondisi Kawasan Minapolitan, maka dilakukan analisis deskriptif berdasarkan indikator sumber daya alam (SDA), infrastruktur, kelembagaan sarana produksi, kelembagaan nelayan, kelembagaan permodalan, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan / industri pengolahan hasil UMKM. Indikator tersebut merupakan salah satu acuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai kelayakan Kawasan Minapolitan. Indikator SDA menunjukkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas komoditas perikanan. Indikator infrastruktur terkait ketersediaan sarana prasarana input, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran produk. Sedangkan kelembagaan terkait dengan ada/tidaknya lembaga penunjang setiap subsistem perikanan serta kualitas dari kelembagaan tersebut. Secara detail penilaian dilakukan pada Kawasan Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai yang ada di Indonesia.

Pengembangan SDM di wilayah minapolitan utamanya dilakukan secara berkelompok. Pada tiap kecamatan terdapat kelembagaan baik dalam bentuk kelompok perikanan atau koperasi. Namun demikian aktivitas kelembagaan ini masih belum optimal karena ada beberapa kelompok yang jarang bertemu. Selain itu, beberapa kelompok juga aktivitasnya masih terbatas pada aspek budidaya padahal masalah utama pelaku usaha perikanan pada aspek pemasaran. Apabila dilihat dari sisi aset dan peralatan, maka tiap kelompok telah memiliki sarana prasarana yang memadai.

Nelayan memperoleh modal dari berbagai pihak. Modal terbesar diperoleh dari modal mandiri atau pedagang ikan. Nelayan akan memperoleh pinjaman modal pada awal budidaya atau sebelum memulai aktivitas melaut. Pinjaman modal tersebut akan dikembalikan pada saat panen atau setelah pulang dari aktivitas melaut menangkap ikan. Sistem semacam ini sudah umum terjadi pada perikanan di kawasan strategis minapolitan.

Permasalahan yang umum terjadi pada aspek permodalan adalah kesulitan nelayan untuk mengakses kredit dari bank. Nelayan menghadapi hambatan berupa kesulitan mengikuti prosedur yang ada di bank maupun tidak memiliki barang agunan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akses permodalan nelayan di wilayah strategis minapolitan masih perlu dibenahi utamanya dalam hal perbankan. Selain itu, belum ada pelaku usaha perikanan yang menjalin kemitraan dengan perusahaan sehingga tidak ada modal pinjaman dari lembaga formal atau badan usaha.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (Tabel 5) diketahui kekuatan kawasan minapolitan lebih besar daripada kelemahan. Kekuatan terbesar kawasan minapolitan adalah keterampilan nelayan dalam membudidayakan ikan. Nelayan memperoleh penyuluhan dan pelatihan baik dari pemerintah maupun pihak lain. Alasan lain karena pembudidaya ikan dan nelayan telah melaksanakan bisnis tersebut sejak lama sehingga keterampilan dan pengalamannya diperlukan. Kekuatan paling kecil yang dihadapi pelaku usaha perikanaan di minapolitan adalah tingginya serangan organisme pengganggu, terutama budidaya ikan air tawar. Banyak sekali serangan jamur yang menyerang ikan budidaya dan sampai saat ini pembudidaya ikan masih belum mampu mengatasinya.

Kelemahan terbesar yang terjadi di kawasan minapolitan adalah nelayan belum mampu menyimpan produk hasil tangkapan. Nelayan belum memiliki pengetahuan untuk melakukan penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan lebih senang untuk langsung menjual produknya agar langsung memperoleh uang. Nelayan juga tidak memiliki sarana penyimpanan sehingga akan langsung menjual produk agar produk tidak busuk atau berkurang nilai jualnya. Untuk kelemahan terendah yang dihadapi oleh nelayan adalah jumlah produksi yang rendah. Sebagian besar wilayah minapolitan memiliki potensi alam yang sangat baik sehingga produksi nelayan dapat optimal.

Tabel - 5: Matriks IFAS

No.	IFAS	B	R	BXR
1	**Kekuatan (strengths)**			
	Komoditas unggulan	0.10	4	0.4
	Ketersediaan sarana tambat, air bersih, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0.10	3	0.3
	Ketersediaan sumber daya manusia nelayan	0.10	4	0.4
	Ketersediaan unit pengolahan ikan	0.10	3	0.3
	Fasilitas gedung dan tenaga penyuluh perikanan	0.05	4	0.2
	Transportasi dan infrastruktur	0.10	3	0.3
	Pelaku usaha perikanan memiliki keterampilan budi daya	0.05	2	0.2
	Peralatan budi daya lengkap	0.10	3	0.3
	Kemudahan akses permodalan dengan bunga lunak	0.05	4	0.2
	Jumlah nilai kekuatan			**2.6**
2	**Kelemahan (Weakness)**			
	Proses lelang belum berjalan sesuai yang diharapkan	0.10	-2	-0.2
	Koordinasi antarlembaga kurang	0.10	-2	-0.2
	Akses permodalan terbatas	0.15	-2	-0.3
	Kelembagaan pengolah hasil belum berkembang	0.15	-2	-0.3
	Kemampuan pelaku usaha perikanan dalam penyimpanan produk masih terbatas	0.10	-2	-0.2
	Jumlah nilai kelemahan			**-1.2**
	Selisih Kekuatan – Kelemahan			**1.4**

TAMAN DHARMA MANGRVA

Selanjutnya analisis SWOT akan melihat kondisi eksternal pada kawasan minapolitan. Hasil dari analisis ini adalah gambaran mengenai peluang dan ancaman bagi kawasan minapolitan (Tabel 6).

Tabel - 6: Matriks EFAS

NO.	EFAS	B	R	BXR
1	**Peluang / Opportunities**			
	Bantuan modal dan peralatan dari pemerintah	0.15	4	0.6
	Menigkatkan ekonomi masyarakat	0.15	4	0.6
	Himbauan pemerintah mengenai pengaturan budi daya untuk menstabilkan harga	0.15	4	0.6
	Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga	0.15	4	0.6
	Meningkatkan fasilitas pelayanan	0.15	4	0.6
	Jumlah nilai peluang			**3**
2	**Ancaman / Threats**			
	Cuaca dapat mengganggu produksi	0.15	-2	-0.3
	Sampah rumah tangga dan sedimentasi lumpur di kolam labuh	0.15	-2	-0.3
	Fluktuasi harga	0.10	-2	-0.2
	Panjangnya rantai pemasaran	0.10	-4	-0.4
	Limbah yang menggangu kawasan	0.15	-2	-0.3
	Jumlah Nilai Ancaman			**-1.5**
	Selisih Peluang - Ancaman			**1.5**

Pada aspek peluang dan ancaman, wilayah minapolitan memiliki skor peluang yang lebih besar. Apabila dilihat secara mendetail, nilai peluang terbesar adalah peningkatan permintaan karena adanya penambahan jumlah penduduk. Secara teoritis, penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pangan masyarakat, termasuk nantinya konsumsi produk perikanan. Apalagi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang konsumsi protein sehingga membuat konsumsi ikan meningkat pula. Peluang terendah pada

kawasan minapolitan adalah kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Selama ini, kebijakan harga yang diatur pemerintah hanya beras sedangkan untuk produk perikanan belum ada pengaturan dan sangat tergantung pada kondisi pasar.

Ancaman terbesar yang dihadapi oleh nelayan adalah faktor cuaca. Banyak nelayan yang tidak bisa melaut dan menangkap ikan pada saat cuaca dalam keadaan buruk, terutama terjadi pada musim hujan. Begitu pula dengan nelayan budidaya apabila cuaca buruk maka akan muncul serangan penyakit pada ikan yang berdampak terhadap turunnya jumlah produksi. Kelemahan terendah yang dihadapi nelayan adalah kebijakan impor, yang akan menjadi pesaing dalam pemasaran ikan hasil tangkapan.

Berikut adalah diagram hasil analisis SWOT kawasan minapolitan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan dalam mewujudkan ekonomi biru:

Gambar - 7 : Diagram Hasil Analisis SWOT

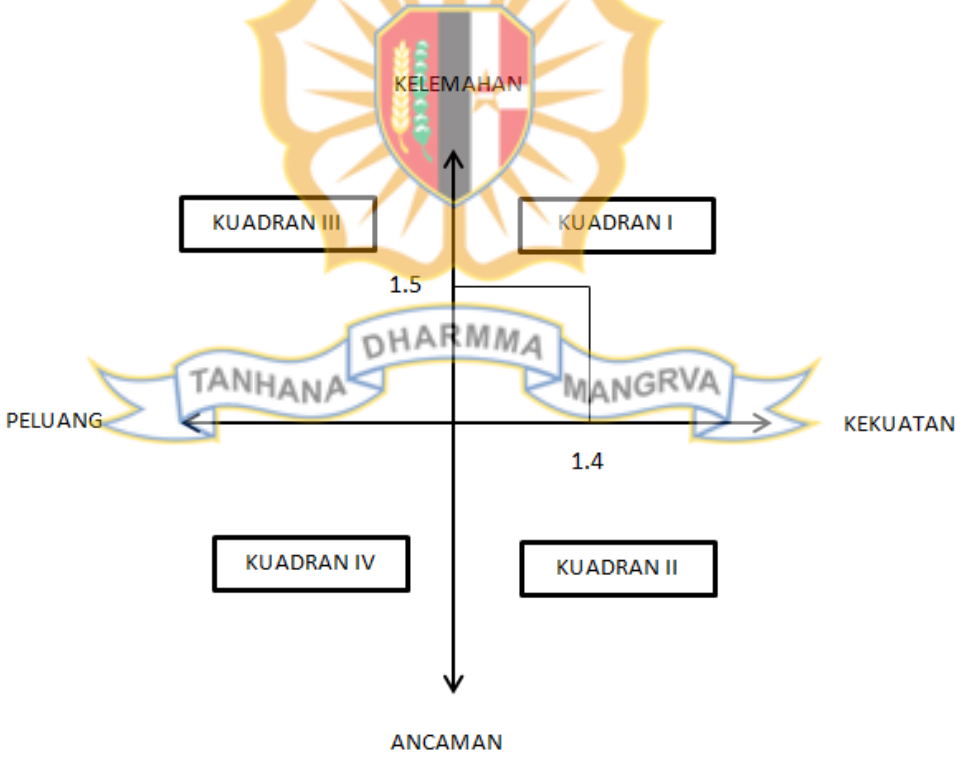

Sumber : Dikelola oleh penulis

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pengembangan kawasan minapolitan pada pelabuhan perikanan memiliki potensi internal dan eksternal pada titik (1,4; 1,5), yaitu pada kuadran I, kuadran tersebut dapat dikatakan bahwa strategi yang cocok untuk pengembangan kawasan minapolitan adalah strategi agresif, dengan kata lain kawasan minapolitan ini memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*) sebagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Strategi agresif difokuskan pada aspek pemasaran, produksi, dan teknis. Dengan fokus pada aspek tersebut, diharapkan mampu bersaing.

Dalam rangka pembangunan kawasan minapolitan, pemerintah harus menyusun berbagai strategi. Strategi yang diutamakan adalah S-O atau strategi agresif dengan cara menguatkan pengembangan produk perikanan. Analisis faktor internal menunjukkan kekuatan (*strength)* yang dimiliki kawasan minapolitan lebih besar daripada kelemahannya karena selisihnya mencapai 1,4. Hal tersebut menunjukkan kelembagaan SDM dan infrastruktur kawasan minapolitan serta akses sosial ekonomi yang sudah baik, walaupun sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan intervensi kebijakan yang tepat. Sedangkan berdasarkan analisis eksternal, kawasan minapolitan menghadapi peluang lebih besar daripada ancaman dengan selisih 1,5.

Selain dari diagram analisis SWOT, maka perlu juga penyusunan strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT ini juga digunakan untuk menyusun rencana strategi yang didasarkan pada faktor *strengths opportunities* (SO), *strengths threats* (ST), *weakness opportunities* (WO), dan *weakness threats* (WT). Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan alternatif strategi yang lebih detail dan aplikatif, yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan Minapolitan.

Tabel - 7 : Matriks Hasil Analisis SWOT

INTERNAL / EXTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
PELUANG	**SO-Strategy *(Strategi Kekuatan & Peluang)*** 1. Penyusunan masterplan Kawasan Minapolitan pada pelabuhan perikanan 2. Memanfaatkan secara maksimal segala potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung program pengembangan Kawasan Minapolitan 3. Memperbaiki aksesibilitas pelayanan di kawasan pelabuhan agar mudah dijangkau dan memperlancar hasil pemasaran 4. Peningkatan keseimbangan distribusi sarana dan prasarana dan pusat kegiatan produktif berbasis komoditas / unggulan.	**WO-Strategy *(Strategi Kelemahan dan Peluang)*** 1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produksi perikanan tangkap yang memiliki potensi yang unggul dan mempunyai daya saing terhadap daerah lain. 2. Menyiapkan insentif dan pelatihan bagi para PPL dan menambah jumlah tenaga PPL. 3. Pengembangan zonasi efektif berdasarkan fungsi kawasan (zona kawasan) dan penyesuaian dengan rencana tata ruang di setiap pelabuhan perikanan
ANCAMAN	**ST-Strategy *(Strategi Kekuatan & Ancaman)*** 1. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan harga. 2. Memberikan motivasi kepada para nelayan dengan memperkenalkan teknologi tepat guna dan berhasil guna untuk merangsang minat mereka dan menyediakan infrastruktur pendukung dalam proses pengembangan kawasan Minapolitan perikanan.	**WT-Strategy *(strategi kelemahan dan ancaman)*** 1. Mengatasi masalah harga produk dengan mengoptimalkan penggunaan lahan dan peningkatan mutu produk. 2. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi nelayan secara terpadu dan mensosialisasikan program pengembangan kawasan Minapolitan.

Sumber : Dikelola oleh penulis

Strategi ini diperoleh karena pada analisis SWOT terlihat nilai kekuatan Kawasan Minapolitan lebih besar dari kelemahannya serta nilai potensi lebih besar dari ancamannya. Namun perlu juga strategi tersebut diikuti dengan langkah penguatan pada aspek budidaya dan kelembagaan. Strategi tersebut perlu melibatkan pemangku kepentingan sehingga menjadi budaya dan dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat.

Perkembangan SDM harus dilakukan dengan sangat baik untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan para pelaku usaha dan para penguna pelabuhan perikanan. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen, pencatatan keuangan dan finansial, dan pemasaran. Pelatihan manajemen berfungsi untuk mengarahkan untuk membentuk struktur organisasi dan deskripsi tugas secara tepat. Pelatihan pencatatan keuangan dan finansial sangat penting dilakukan karena pelaku usaha perikanan sering melupakan aktivitas ini. Akibatnya banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kelayakan usahanya serta kesulitan mengakses modal ke lembaga formal. Pelatihan pemasaran sangat diperlukan kelompok dalam mencari mitra, bernegosiasi serta identifikasi informasi pasar.

Pembangunan kawasan Minapolitan dalam rangka Indonesia menuju ekonomi biru dan dengan kawasan yang ramah akan lingkungan harus ada kerjasama antara lembaga dan antar masyarakat untuk saling menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia khsusnya pelabuhan perikanan pantai. Masyarakat dan para pengguna pelabuhan perikanan dapat mengurangi limbah dan juga dapat memproduksi kembali limbaha tersebut sehingga bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat. Hal tersebut dalam dilakukan dengan bantuan pemerintah dan pihak swasta yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan dan menjaga lingkungan pelabuhan perikanan yang sehat dan ramah lingkungan, sehingga kawasan minapolitan yang ramah lingkungan dapat di ciptakan di kawasan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia dan juga adanya kestabiltas pelayanan yang ada di pelabuhan perikanan.

BAB IV
PENUTUP

16. Kesimpulan

Indonesia telah membangun pelabuhan-pelabuhan perikanan dengan berbagai tipe di seluruh wilayah namun belum dapat memenuhi kebutuhan operasional kapal-kapal perikanan melaksanakan penangkapan ikan dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan serta banyaknya sumber daya perikanan yang ada. Dari segi jumlah masih perlu dibangun Pelabuhan Perikanan baru untuk dapat melayani kapal-kapal perikanan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanqan (WPP). Pembangunan Pelabuhan perikanan juga perlu dilengkapi fasilitas, sumber daya manusia, penataan organisasi dan sistem pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan pembangunan Kota Minapolitan perlu tambahan jumlah Pelabuhan Perikanan Pantai atau peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan dari Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada lokasi yang strategis dan penyebaran seimbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan penataan organisasi, fasilitas, sumber daya manusia yang mampu mendukung operasional pelayanan kapal perikanan.

Dalam melaksanakan operasional pelayanan administrasi penangkapan ikan, Pelabuhan Perikanan Pantai telah memberikan pelayanan kepelabuhanan dan kesyahbandaran namun belum dapat memenuhi harapan masyarakat maupun pelaku usaha perikanan. Untuk dapat menghasilkan pelayanan kepelabuhanan perikanan yang lebih profesional perlu adanya integrasi pelayanan dengan bertransformasi pada model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *one stop service* oleh semua *stakeholder* yang berkepentingan dalam pelayanan kepelabuhanan perikanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, cukup di satu tempat pelayanan sudah dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Pemerintah selaku penyedia layanan perlu merancang dan menempatkan semua unsur yang terlibat dalam pelayanan beserta fasilitas untuk mendukung terselenggaranya pelayanan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan murah.

Dalam hal penataan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai yang saat ini dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu bertransformasi ke dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) supaya memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya organisasi, serta dapat melaksanakan praktek majemen bisnis / privatisasi yang sehat, produktif, efisiensi dan efektifitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya dalam upaya pembangunan Kota Minapolitan yang sehat dan ramah lingkungan. Transformasi organisasi ini akan berpengaruh besar terhadap proses kemandirian organisasi kepelabuhanan, karena dengan bertransformasi ke BLU akan memiliki keleluasaan optimalisasi mengelola sumber daya organisasi yang ada. Selain itu juga dapat mempraktekkan manajemen bisnis yang sehat, produktif, efektif dan efisien sehingga mampu bersaing dengan perubahan lingkungan yang dinamis searah perkembangan lingkungan global dan regional.

Untuk mewujudkan program ekonomi biru di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai perlu dibangun suatu kawasan tata ruang yang ramah lingkungan dengan tata kelola Kota Minapolitan. Tata kelola Kota Minapolitan merupakan konsep pembangunan desa yang ramah lingkungan sebagai sebuah wilayah yang mandiri dalam bidang ekonomi maritim dengan memperhatikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah sisa industri, pemberdayaan energi baru terbarukan yang dapat dikelola di wilayah tersebut. Kota Minapolitan bukan sekedar menjadi basis bisnis perikanan, tetapi juga sebagai kawasan industri, obyek pariwisata, sentra perdagangan, wilayah konservasi dan daerah transportasi dengan basis kekuatan maritim. Dengan adanya perpaduan kepentingan ekonomi yang bertemu dalam sebuah Kota Minapolitan, maka akan diperoleh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan tata kelola kota yang ramah lingkungan akan mendorong terciptanya kesehatan lingkungan laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi yang didapat dari analisis di atas adalah adanya penguatan kelembagaan di pelabuhan perikanan guna mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan dalam rangka Indonesia menuju ekonomi biru.

17. Saran

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Minapolitan di Indonesia yang ramah lingkungan, terintegrasi dan berkelanjutan hingga masa yang akan datang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Untuk mensukseskan program pembangunan Kota Minapolitan yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan satu pusat koordinator pembangunan sekaligus sebagai tempat monitoring dan evaluasi yang mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus dilaksanakan oleh instansi pusat, maka disarankan pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai koordiantor pembangunan Kota Minapolitan di seluruh Indonesia. Pembangunan Kota Minapolitan merupakan bagian tugas dan fungsi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, maka instansi pusat sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan kota Minapolitan adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan didukung oleh kementrian dan instansi terkait sesuai fungsi yang dibutuhkan.

b. Pembangunan Kota Minapolitan dalam suatu kawasan bukan merupakan suatu program berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi dengan pembangunan dan tata kelola wilayah / spasial yang lain. Spasial pada program Kota Minapolitan juga banyak menggunakan wilayah daratan sebagai tempat kegiatan dan habitat hidup masyarakat pada umumnya, maka menjadi sebuah keniscayaan dilaksanakan sinkronisasi dengan program pembangunan tata ruang dan wilayah daratan serta pelaksanaan program ekonomi hijau. Nelayan tidak dapat melaut sepanjang tahun, pada musim barat atau paceklik membutuhkan lapangan kerja dan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat diwadahi dengan integrasi program ekonomi hijau yang berbasis pertanian dan perkebunan. Perpaduan program ekonomi hijau dan ekonomi biru pada sebuah kawasan akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang mampu mendukung ketahanan ekonomi secara nasional.

c. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik kawasan Kota Minapolitan serta program pelayanan pemerintah lainnya yang berbasis layanan elektronik, maka perlu dilaksanakan sinkronisasi pelayanan publik di

Pelabuhan Perikanan Pantai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajaran pelayanan publik lainnya dengan melaksanakan transformasi digital / digitalisasi. Transformasi digital ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi yang cepat dari kantor pusat untuk pengesahan layanan administrasi yang berada jauh dari lokasi Pelabuhan Perikanan tempat dilaksanakannya pelayanan, sehingga prosedur administrasi yang sederhana dapat dilaksanakan sekaligus di satu pintu. Dengan demikian akan terdukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu / *One Stop Service.*

d. Pembangunan Kota Minapolitan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian akan melibatkan berbagai kepentingan politik yang ada di pusat, provinsi dan kabupaten / kota, sehingga perlu adanya kesepahaman. Untuk itu perlu dilaksanakan konsolidasi demokrasi antara pusat dann daerah sebagai upaya mencapai kesepakatan dan kesepahamam dalam hal pengelolaan ruang wilayah laut. Pengelolaan ruang wilayah laut yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah sesuai undang-undang otonomi daerah dapat terselenggara dengan optimal. Demikian juga dalam hal pelayanan administrasi yang jenjang pelayanan menjadi kewenangan dari masing-masing instansi pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya sering menimbulkan tumpang tindih kepentingan dan saling tarik ulur kewenangan yang akibatnya merugikan masyarakat. Konsolidasi politik antara pusat dan daerah menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan untuk mencapai pelayanan smart kepada masyarakat di Pelabuhan Perikanan.

e. Untuk mendapatkan perimbangan komposisi pembangunan Pelabuhan Perikanan di Indonesia yang tersebar secara merata maka Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kabupaten / Kota disarankan untuk memprioritaskan program pembangunan Pelabuhan Perikanan baru tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai) dan / atau peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan dari PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) ke PPP di lokasi strategis terpilih yang memenuhi syarat dilaksanakannya implementasi program Kawasan Kota Minapolitan. Upaya ini akan memberikan keseimbangan pembangunan yang saat ini masih terfokus di wilayah barat Indonesia.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan juga memerlukan kelengkapan fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Tiap-tiap pelabuhan perikanan memiliki karakteristik tersendiri menyesuaikan dengan situasi laut yang dihadapinya serta produksi ikan yang didaratkan. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pembangunan fasilitas dari masing-masing pelabuhan perikanan juga disesuaikan dengan kondisi dimana pelabuhan perikanan tersebut dibangun.

f. Kota Minapolitan yang telah terintegrasi antar *stakeholder* terkait disarankan untuk melaksanakan tranformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu / *One Stop Service.* Pelayanan saat ini masih dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing instansi berintegrasi dalam satu tempat yang disiapkan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai. *Stakeholder* lain yang menjadi pendukung dalam pelayanan publik dapat menyiapkan unit kerjanya untuk memberikan pelayanan pada titik pelayanan yang sama dengan tetap menjamin akses komunikasi dan legalitas dari kantor pusatnya.

g. Dinas Kelautan dan Perikanan disarankan untuk melaksanakan transformasi organisasi kepelabuhanan perikanan dari Unit Pelaksana Teknis / UPT menjadi Badan Layanan Umum / BLU. Transformasi organisasi ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada organisasi kepelabuhanan dalam mengelola sumber daya organisasi sebagai upaya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih professional dan transparan kepada masyarakat. Transformasi organisasi ini dapat dilaksanakan karena kepelabuhanan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan yang mampu melaksanakan produktifitas sebagai layaknya sebuah badan usaha.

h. Pada level implementasi program pembangunan Kota Minapolitan, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai adalah motor utama dalam pembangunan Kota Minapolitan di wilayah kerjanya, maka perlu aktifasi melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja sederajat dengan:

1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dalam rangka penggunaan lahan lokasi kawasan industri, pasar dan tempat pelelangan.

2) Camat dan Kepala Desa dalam rangka penggunaan lokasi kegiatan dan pengembangan perijinan pemanfaatan ruang wilayah.

3) Universitas / akademisi dalam rangka penelitian dan pengembangan strategi dan tata kelola kepelabuhanan dan produk.

4) Pos Polair dalam rangka pengamanan wilayah pelabuhan dan penegakan hukum di pelabuhan.

5) Pos TNI AL dalam rangka pengamanan navigasi dan wilayah penangkapan ikan serta penegakan hukum di laut.

6) Koperasi Unit Desa dalam rangka *supply* dukungan kebutuhan melaut, perbaikan dan pemasaran hasil tangkapan.

7) Pelaku usaha perikanan dalam rangka investasi penangkapan ikan, pemasaran, pengolahan ikan, perbengkelan dan pembangunan kapal.

8) Masyarakat sekitar pelabuhan dalam rangka memelihara dan mensukseskan setiap usaha yang dilaksanakan guna tercapai tata kota Minapolitan yang mandiri, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

DAFTAR PUSTAKA

_____ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

_____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

_____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

_____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah

_____ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan

_____ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Penerbit Pembaharuan, Yogyakarta

Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta

Bappenas, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2013. *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019*.

Diana Indra Dewi, 2018, *Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan*, FKIP UMP, Jakarta.

Emil Salim, 1982. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.

Hill, H. 2000. *The Indonesian Economy*, Cambridge Univerty Press, Cambridge.

Humphrey Wangke, 2022. *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru : Transformasi Ekonomi Kelautan Berlelanjutan di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,

Irham, Fahmi. 2015. *Manajemen Strategis.* Bandung: CV Alfabeta

Iskandar Putong, 2005. *Teori Ekonomi Mikro,* Mitra Wancana Media, Jakarta.

Kamaruddin, S. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*, Ombak, Yogyakarta.

Lubis, Ernani. 2012. *Pelabuhan Perikanan*, IPB Press, Bogor.

Michael P. Todaro dan Stephen C Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta.

Munadjat Danusaputro, 1980. *Hukum Lingkungan Buku-I* : Umum, Binacipta, Bandung.

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

Robbins, Stephen, P. 2006. *Perilaku Organisasi*, PT. Prehalindo, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2022. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Msalah dan Dasar Kebijakan,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sharif C. Sutardjo, 2019. *Blue Economy Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.

Sulistiyono. 2015. *Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik VINYL Di Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Triatmojo, S. 2013. *Pelabuhan*. Beta Offset Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Wardoyo, P. 2011. *6 Alat Analisis Manjameen.* Semarang University Press, Semarang.

Zulganef, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Bisnis,* Graha Ilmu, Yogyakarta.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

Lampiran : 1

ALUR PIKIR

PENINGKATAN PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA MINAPOLITAN GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU

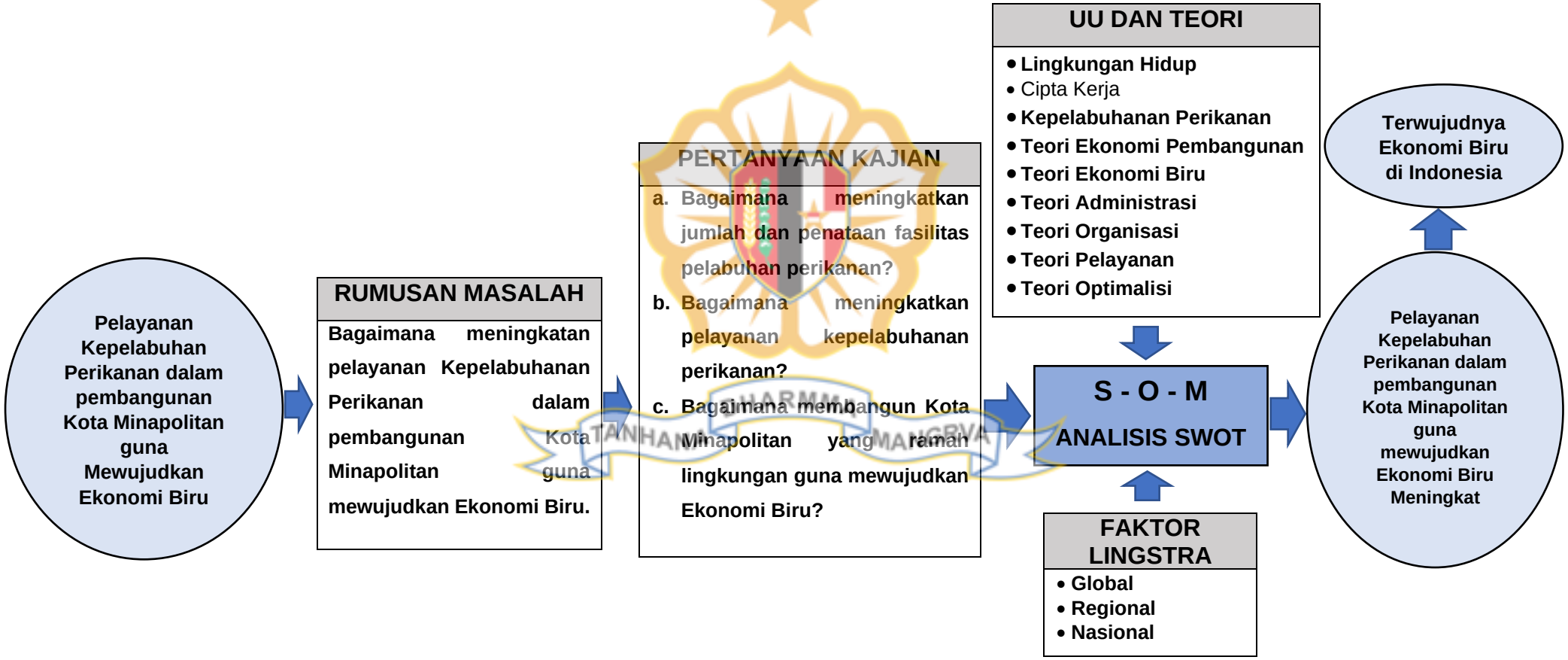

Lampiran : 2

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DI INDONESIA

NO	NAMA PELABUHAN	PROVINSI	KRITERIA							
			SDA	INFRA STRUK TUR	SARA NA PRO DUKSI	KELEM BAGA AN SDM	PERMO DALAN	FASI LITAS	PEMA SA RAN	PENGO LAHAN HASIL DAN UMKM
1	Sungai Rengas	Kalimantan Barat	Bagus	Sedang	sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
2	Bacan	Maluku Utara	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
3	Sorong	Papua Barat	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
4	Blanakan	Jawa Barat	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
5	Bajomulyo	Jawa Tengah	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
6	Asem Doyong	Jawa Tengah	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
7	Paiton	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
8	Kota Agung	Lampung	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
9	Tumumpa	Sulawesi Utara	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
10	Teluk Batang	Kalimantan Barat	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
11	Labuhan Lombok	Nusa Tenggara Barat	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
12	Karimun Jawa	Jawa Tengah	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Kurang
13	Bondet	Jawa Barat	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Bagus
14	Tasik Agung	Jawa Tengah	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
15	Morodemak	Jawa Tengah	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang
16	Tawang	Jawa Tengah	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Sedang
17	Klidang Lor	Jawa Tengah	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
18	Tegalsari	Jawa Tengah	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang
19	Pondok Dadap	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
20	Muncar	Jawa Timur	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
21	Lekok	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang

TANHANA DHARMA MANGRVA

22	Mayangan	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang
23	Lempasing	Lampung	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
24	Teladas	Lampung	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang
25	Tobelo	Maluku Utara	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang
26	Ciparage	Jawa Barat	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
27	Labuan (Banten)	Banten	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Sedang	Bagus
28	Dobo	Maluku	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang	Bagus
29	Eretan Wetan	Jawa Barat	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Bagus
30	Puger	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Bagus
31	Sadeng	Yogyakarta	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang
32	Batulicin	Kalimantan Selatan	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Sedang
33	Tamperan	Jawa Timur	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Sedang
34	Pulau Baai	Bengkulu	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Kurang	Bagus
35	Ogotua	Sulawesi Tengah	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Kurang
36	Muara Ciasem	Jawa Barat	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang
37	Cilauteureun	Jawa Barat	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Bagus	Sedang
38	Wonokerto	Jawa Tengah	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang		Bagus
39	Bulu (Tuban)	Jawa Timur	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang
40	Labuhan Maringgai	Lampung	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Bagus	Sedang
41	Muara Sungai Baturusa	Kep. Bangka Belitung	Bagus	Sedang	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Kurang	Bagus
42	Labuhan haji	Aceh	Bagus	Bagus	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Bagus

DHARMA TANHANA MANGRVA

Lampiran : 3

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana komoditas unggulan di Pelabuhan Perikanan?
2.	Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia nelayan?
3.	Bagaimana ketersediaan unit pengolahan ikan?
4.	Bagaimana fasilitas gedung dan tenaga penyuluh perikanan?
5.	Bagaimana transportasi dan infrastruktur Pelabuhan Perikanan?
6.	Bagaimanakah ketrampilan pelaku usaha perikanan budidaya?
7.	Bagaimanakah kelengkapan peralatan budidaya perikanan?
8.	Bagaimanakah proses lelang di pelabuhan perikanan?
9.	Bagaimanakah sistem koordinasi antar lembaga pelayanan?
10.	Apakah akses permodalan terbatas?
11.	Apakah kelembagaan pengolah hasil belum berkembang?
12.	Bagaimana kemampuan pelaku usaha perikanan dalam penyimpanan produk masih terbatas?
13.	Bagaimanan bantuan modal dan peralatan dari pemerintah?
14.	Apakah program minapolitan dapat menigkatkan ekonomi masyarakat?
15.	Bagaimana himbauan pemerintah mengenai pengaturan budidaya untuk menstabilkan harga?
16.	Bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga?
17.	Apakah program minapolitan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan?
18.	Apakah keadaan cuaca dapat mengganggu produksi?
19.	Bagaimana panjangnya rantai pemasaran produksi perikanan?
20.	Apakah limbah menggangu kawasan pelabuhan perikanan?

Lampiran : 4

TABEL HASIL KUESIONER

RESPONDEN	FAKTOR STRATEGIS																			
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3
2	3	4	4	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3
3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3
4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3
5	3	4	4	4	3	3	3	4	1	3	3	2	3	2	1	3	2	4	2	2
6	3	4	3	3	4	1	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	4	3	3
7	2	3	4	4	3	2	3	4	2	2	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3
8	2	3	4	4	3	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	4	3	4	3
9	3	3	4	4	3	2	2	4	2	3	4	2	2	3	2	3	4	4	3	3
10	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	1	3	3	3
11	4	3	4	3	3	2	3	4	1	3	4	2	3	3	1	3	3	4	3	3
12	4	3	4	4	3	2	3	4	2	2	4	1	3	2	2	2	4	4	5	1
13	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
14	3	4	4	4	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3
15	4	3	3	4	3	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	2	3	3	3	3
16	4	3	4	3	3	2	3	4	1	3	3	2	3	3	1	3	4	4	3	3
17	2	3	4	4	3	2	3	4	2	3	4	2	3	3	2	3	2	4	3	3
18	4	3	4	4	3	2	3	3	2	3	3	1	3	2	2	3	2	4	2	2
19	4	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	1	4	3	3
20	3	3	4	4	2	1	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	4	3	2
21	4	3	3	3	3	2	2	4	2	2	4	1	2	3	2	2	3	3	4	3
22	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	3
23	3	3	3	4	3	2	3	3	1	3	4	2	3	2	2	3	4	4	2	2
24	3	3	4	4	3	2	3	4	2	3	4	2	3	3	2	3	3	4	2	3
25	4	3	4	4	2	1	2	4	2	2	3	1	2	3	2	2	2	4	3	3
26	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	2	2	4	3	2
27	3	3	4	4	3	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	4	3	3
28	3	3	4	4	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3	2	4	4	3
29	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	1	2	3	2	3	3	4	3	3
30	2	3	4	4	3	1	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3
31	4	3	3	4	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3	4	3	4	3	2
32	3	2	3	3	3	2	3	3	1	2	3	2	2	2	4	3	3	2	1	4
33	4	4	2	3	3	4	3	2	4	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3
34	4	3	4	4	2	4	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3	3	4	1
35	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3	2	3	3	4
JML	**110**	**110**	**124**	**126**	**100**	**73**	**98**	**118**	**69**	**93**	**116**	**71**	**96**	**97**	**71**	**95**	**96**	**128**	**103**	**97**
RATA - RATA	**3,1**	**3,1**	**3,5**	**3,1**	**2,8**	**2**	**2,8**	**3,3**	**1,9**	**2,6**	**3,3**	**2**	**2,7**	**2,7**	**2**	**2,7**	**2,7**	**3,6**	**2,9**	**2,7**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV

A. Data Pokok

Nama	:	Dr. Budi Santoso, M.A.P., M.Tr.Opsla
Pangkat / Gol	:	Kolonel Marinir
Tempat / Tgl Lahir	:	Semarang, 04 - 11 - 1969
Jabatan	:	Sahli F Binpotnaskuatmar Koarmada II
Instansi	:	TNI AL
Agama	:	Islam
Alamat Email	:	buddi_151@yahoo.co.id

B. Pendidikan Umum

1. SDN - 1 Bringin	Tahun 1983
2. SMPN - 1 Getas	Tahun 1985
3. SMAN - 1 Tengaran	Tahun 1988
4. S1 - UTS	Tahun 2008
5. S2 - UHT	Tahun 2013
6. S3 - UNTAG	Tahun 2020

C. Pendidikan Militer

1. AAL - XXXVII	Tahun 1991
2. DIKPASSIS - IV	Tahun 1992
3. DIKLAPA - I	Tahun 1994
4. DIKLAPA - II	Tahun 2000
5. SESKO AL - XLV	Tahun 2007
6. PPRA - LXIV	Tahun 2007

TANHANA DHARMMA MANGRVA

D. Pengalaman Penugasan

1. Kadep Kepemimpinan AAL
2. Kabag Kepegawaian Roum Settama Bakamla RI
3. Kasubdit Dukyantadik Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Kabag SDM Roum Settama Lemhannas RI
5. Sahli F Binpotnaskuatmar Koarmada II

E. Data Keluarga

1. Nama Istri Rini Prasetyowati, S.H.
2. Nama Anak - Daffa Nurrofi Setyabudi, S.H., M.H.
   - Majdiyka Ibnuashfan Setyabudi

Jakarta, 5 Oktober 2022

Peserta

Dr. Budi Santoso, M.A.P., M.Tr.Opsla.

Kolonel Marinir NRP.10151/P

TANHANA DHARMMA MANGRVA